KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP DAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA
("KETERBUKAAN INFORMASI")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK ("**PERSEROAN**") DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP TERMASUK RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA ("**RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING***"). KETERBUKAAN INFORMASI INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MEMASTIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TETAP TERLINDUNGI, RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING* DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 45/POJK.04/2024 TANGGAL 27 DESEMBER 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK ("**POJK 45/2024**"), PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29/POJK.04/2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("**POJK 29/2023**") SERTA PERATURAN NO. I-N TENTANG PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BURSA EFEK INDONESIA NO. KEP-0054/BEI/05-2024 TANGGAL 6 MEI 2024 ("**PERATURAN BEI NO. I-N**").

PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha
Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya

Berkedudukan di Bekasi, Indonesia

Alamat
Jl. Raya Sultan Agung Km.28.5, Kp. Rawa Pasung,
Kota Baru, Kota Bekasi, 17133
Telepon: (62-21) 884 0040
Website: https://champion.co.id/ ; Email: corporate@champion.co.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

(i) MELAKUKAN PEMBATALAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA;
(ii) MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP;
(iii) MELAKUKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*;
(iv) MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING* PERSEROAN.

Pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham telah diumumkan pada tanggal 2 November 2026 pada situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan Perseroan serta di surat kabar berbahasa Indonesia yakni Link Bisnis. RUPSLB direncanakan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2026 pada pukul 10.00 WIB hingga selesai, yang akan dilaksanakan di Mitsui House Jakarta, Jl. Diponegoro No. 42, Menteng, Jakarta Pusat. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham akan diumumkan pada tanggal 17 November 2026 oleh Perseroan pada situs web BEI, KSEI, dan Perseroan. Dalam hal terdapat tambahan dan/atau perubahan atas Keterbukaan Informasi, Perseroan akan melakukan pengumuman paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").

Perseroan juga akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik setelah memperoleh persetujuan dalam RUPSLB terhadap seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu sebanyak 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili sekitar 16,78% (enam belas koma tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang menjadi obyek Pembelian Kembali Saham dengan harga Pembelian Kembali Saham sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) per saham.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk, Lantai 12, Jl. Hayam Wuruk, No. 8, Jakarta
Telepon: 021-80632800 | Faks: 021-3840041

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apa pun dari Keterbukaan Informasi ini atau mengenai tindakan yang harus Anda ambil, maka Anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek Anda atau wakil perusahaan efek terdaftar Anda, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI, DAN SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 2 NOVEMBER 2026
DIREKSI PERSEROAN

I. DEFINISI

Dalam Keterbukaan Informasi ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan lain, ungkapan-ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi sebagaimana didefinisikan sesuai dengan UUP2SK, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dan orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dan pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (Ernst & Young) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

Entitas Anak berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Anggaran Dasar berarti Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi, yaitu sebagaimana dimuat dalam Akta No. 195 tanggal 30 Oktober 1975, dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/215/9 tanggal 27 Juni 1978, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 473 tanggal 1 Agustus 1978 Tambahan No. 61 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 409 tanggal 29 Juni 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047315.AH.01.02.TAHUN 2026, tanggal 6 Juli 2026, sehubungan dengan persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

BEI berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek atau **BAE** berarti PT Adimitra Jasa Korpora, yang merupakan biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengelola efek Perseroan.

Daftar Pemegang Saham berarti daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek.

Delisting berarti penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No. I-N.

Dewan Komisaris berarti Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi berarti Direksi Perseroan.

FPKS berarti Formulir Pembelian Kembali Saham.

Harga Pembelian Kembali Saham berarti harga yang ditawarkan oleh Perseroan yakni sebesar Rp 1.050 (seribu lima puluh Rupiah) sebagaimana didefinisikan dalam Bab V Informasi Mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Publik Bagian C pada Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, cuti bersama, dan hari non-bursa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham berarti jangka waktu keseluruhan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini pertama kali diumumkan, yakni sampai dengan tanggal 2 November 2027.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan, diterbitkan pada 2 November 2026.

KSEI berarti Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Para Pemegang Saham atau **Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Pemegang Saham Independen berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK) dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020 dan POJK 45/2024).

Pemegang Saham Publik berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya menjadi objek Pembelian Kembali Saham sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, sebagaimana dimaksud dalam POJK 45/2024.

Pembelian Kembali Saham berarti penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian dari Pemegang Saham Publik yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam rangka perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Penawaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan POJK 45/2024 dan POJK 29/2023.

Pemohon atau Para Pemohon berarti Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Pembelian Kembali Saham ini sebelum Tanggal Pembayaran paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2027 pukul 16:00 WIB.

Pengendali berarti Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Peraturan BEI No. I-N berarti Peraturan No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) pada Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 6 Mei 2024.

Periode Pembelian Kembali Saham berarti setiap periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPSLB sebagaimana diuraikan pada Bab V. Informasi Mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Publik Bagian D pada Keterbukaan Informasi ini.

Pernyataan Pendaftaran berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka penawaran umum atau perusahaan terbuka sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Perseroan berarti **PT Champion Pacific Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Bekasi, Indonesia.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk berarti PT Equity Sekuritas Indonesia, perusahaan efek yang merupakan anggota bursa BEI dan terdaftar sebagai anggota Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan KSEI, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, termasuk menerima dan memverifikasi pengajuan partisipasi serta melaksanakan pembayaran Harga Pembelian Kembali Saham kepada Pemegang Saham Publik melalui KSEI.

PMK 81/2024 berarti Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026, tanggal 22 Januari 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

POJK 14/2025 berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025, tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 29/2023 berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 , tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

POJK 45/2024 berarti Peraturan OJK No.45/POJK.04/2024, tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Rencana *Go Private* dan *Delisting* berarti rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana *Delisting*.

RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 9 Desember 2026 sehubungan dengan Rencana *Go Private dan Delisting* dan perubahan Anggaran Dasar serta, jika diperlukan, setiap RUPSLB selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan).

Rp berarti mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini.

Saham berarti saham-saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Saham Publik berarti seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu sebanyak 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili sekitar 16,78% (enam belas koma tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang menjadi obyek Pembelian Kembali Saham.

Suspensi Perdagangan berarti suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI yang telah diumumkan oleh BEI berdasarkan surat No.: PENG-SPT-00020/BEI.PP2/10-2026 pada tanggal 16 Oktober 2026.

Tanggal Pemanggilan RUPSLB berarti tanggal 17 November 2026, yaitu tanggal dilakukannya pemanggilan secara resmi oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB, yang memuat informasi mengenai waktu, tempat, mata acara rapat, serta tata cara kehadiran dan pemberian suara dalam RUPSLB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tanggal Pembayaran berarti tanggal dilakukannya pembayaran Harga Pembelian Kembali Saham kepada Pemohon yang permohonannya telah diverifikasi dan disetujui, melalui Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan KSEI, untuk setiap Periode Pembelian Kembali Saham, yaitu tanggal 15 Februari 2027 untuk Periode I, 14 Mei 2027 untuk Periode II, 16 Agustus 2027 untuk Periode III, dan 2 November 2027 untuk Periode IV, sebagaimana diuraikan pada Bab V Bagian D Keterbukaan Informasi ini.

Tanggal Pencatatan berarti tanggal 16 November 2026, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUPT berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

WIB berarti Waktu Indonesia Barat.

II. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham terkait:

- Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk pembatalan pencatatan saham Perseroan dari BEI;
- Tinjauan umum mengenai ketentuan dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*;
- Rencana pembelian kembali saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*; dan
- Informasi mengenai penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tata cara kehadiran dan pemberian suara sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting.*

B. Latar Belakang Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, Perseroan telah menyampaikan surat No. 075/CPI/DIR/X/2026 tanggal 15 Oktober 2026 mengenai Permohonan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Permohonan Suspensi Efek Perseroan kepada BEI dan OJK, yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan *Go Private* dan *Delisting*.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2026, BEI melalui Pengumuman No. PENG-SPT-00020/BEI.PP2/10-2026 telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek Perseroan di BEI pada seluruh pasar, yang berlaku efektif sejak Sesi Pra-Pembukaan Perdagangan Efek tanggal 16 Oktober 2026 hingga pengumuman BEI lebih lanjut.

Perseroan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik sehubungan dengan penghentian sementara perdagangan efek dan Rencana *Go Private* dan *Delisting* pada tanggal 16 Oktober 2026 melalui situs web BEI dan Perseroan.

Sebagai tindak lanjut atas hal-hal tersebut di atas, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024, POJK 29/2023, dan Peraturan BEI No. I-N.

III. INFORMASI MENGENAI RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*

A. Alasan dan Tujuan Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan *Delisting* dengan alasan-alasan dan tujuan sebagai berikut:

a. Perseroan merupakan entitas induk (*holding company*) yang memiliki kegiatan usaha melalui entitas anak di berbagai sektor, yakni industri wadah untuk keperluan farmasi, makanan, dan kosmetik, perdagangan umum, jasa pengangkutan, percetakan, serta kegiatan usaha terkait lainnya. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha jangka panjang, Perseroan berencana melakukan penataan dan optimalisasi strategi bisnis guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha;

b. Perseroan bermaksud untuk memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi dengan peningkatan produktivitas dan kinerja operasional serta pengembangan bisnis;

c. Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengakses kebutuhan pendanaan melalui pasar modal, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang, sehingga Perseroan memandang bahwa status sebagai perusahaan terbuka tidak lagi diperlukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dan strategi pengembangan usaha Perseroan; dan

d. Saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di BEI dengan frekuensi dan volume perdagangan saham yang terbatas dalam periode tertentu, serta minimnya aktivitas transaksi di pasar yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi pasar saham sebagai sarana likuiditas bagi Pemegang Saham Publik.

Sejalan dengan huruf (d) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan Saham Perseroan, tidak mudah bagi Pemegang Saham Publik untuk melakukan transaksi atas Saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, Pemegang Saham Publik memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan Saham Publik melalui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan dengan Harga Pembelian Kembali Saham sebagaimana disampaikan pada Bab V bagian C di bawah ini.

B. Tinjauan Umum dan Persyaratan Pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Rencana *Go Private* dan *Delisting* merupakan rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, yang mencakup pembatalan pencatatan Saham Perseroan dari BEI serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status tersebut.

Pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan POJK 45/2024, POJK 29/2023, dan Peraturan BEI No. I-N.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* mencakup tahapan dan persyaratan utama sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Saham Independen

Rencana *Go Private* dan *Delisting* harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB sesuai dengan ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik

Dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, Perseroan akan melakukan pembelian kembali Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen pada RUPSLB.

Informasi lebih lanjut mengenai rencana Pembelian Kembali Saham, termasuk harga, periode, mekanisme pelaksanaan, serta sumber pendanaan, diuraikan dalam Bab V Keterbukaan Informasi ini.

3. Pemenuhan Persyaratan Perubahan Status Perseroan

Perseroan wajib memenuhi persyaratan lainnya dalam rangka rencana perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024.

4. Pembatalan Pencatatan Saham dari BEI dan Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan akan melaksanakan proses pembatalan pencatatan Saham dari BEI dan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup, setelah memperoleh persetujuan dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku oleh OJK dan BEI.

C. Manfaat-Manfaat Rencana *Go Private* dan *Delisting* kepada Pemegang Saham Publik

Rencana *Go Private* dan *Delisting* diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham Publik untuk menjual Saham Publik yang dimilikinya melalui mekanisme pembelian kembali Saham Publik oleh Perseroan.

1. Harga Pembelian Kembali Saham yang Menarik

Dalam hal Rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui oleh RUPSLB, Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham dengan harga pembelian kembali saham yang menarik dan lebih tinggi dibandingkan harga minimum penawaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan harga sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024 dan POJK 29/2023.

Informasi lebih lanjut mengenai rencana Pembelian Kembali Saham, termasuk harga, periode, mekanisme pelaksanaan, serta sumber pendanaan, diuraikan dalam Bab V Keterbukaan Informasi ini.

2. Pembayaran Biaya Transaksi/Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (*broker*/pialang) oleh Perseroan

Perseroan akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham Publik sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

3. Konsekuensi dari Segi Pajak

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Pembelian Kembali Saham hanya akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham, atau 0,6% (nol koma enam persen) dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan PMK 81/2024.

Dalam hal pencatatan Saham dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham Publik yang tidak ikut serta dalam Pembelian Kembali Saham akan menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat di BEI. Dengan demikian, Pemegang Saham Publik tersebut tidak akan dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual Sahamnya setelah Saham Perseroan tidak lagi tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka dapat dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, keuntungan dari penjualan Saham

akan dikenakan dengan tarif PPh badan sebesar 22% (dua puluh dua persen) . Sementara itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, keuntungan dari penjualan Saham akan dikenakan tarif PPh progresif sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen). Apabila Pemegang Saham merupakan Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 238 PMK 81/2024
, maka penjualan Saham Perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI akan dikenakan PPh Pasal 26 yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan hasil neto. Perkiraan penghasilan neto tersebut ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga tarif efektif PPh yang dikenakan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual Saham, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

D. Konsekuensi Rencana *Go Private* dan *Delisting* bagi Pemegang Saham Publik

Apabila Rencana *Go Private* dan *Delisting* telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dan seluruh persyaratan yang berlaku telah dipenuhi, Perseroan akan berubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup serta saham Perseroan tidak lagi tercatat dan diperdagangkan di BEI.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham Publik yang tidak berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham dan tetap memiliki saham Perseroan setelah selesainya proses *Go Private* dan *Delisting* akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang berstatus perusahaan tertutup.

Dengan demikian, Pemegang Saham Publik tersebut perlu memperhatikan konsekuensi sebagai berikut:

a. Saham Perseroan tidak lagi dapat diperdagangkan melalui BEI, sehingga kesempatan untuk menjual saham melalui mekanisme perdagangan di BEI tidak lagi tersedia;
b. Likuiditas saham Perseroan berpotensi menjadi lebih terbatas karena pengalihan saham setelah *Delisting* harus dilakukan melalui mekanisme di luar BEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
c. Pengalihan saham setelah Perseroan berstatus sebagai perusahaan tertutup dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan transaksi saham melalui BEI, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, Pemegang Saham Publik diharapkan untuk mempertimbangkan secara saksama manfaat dan konsekuensi Rencana *Go Private* dan *Delisting* sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan kepemilikan Sahamnya dalam Perseroan.

IV. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Igar Jaya berdasarkan Akta Notaris No. 195 tanggal 30 Oktober 1975 dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/215/9 tanggal 27 Juni 1978, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 473 tanggal 1 Agustus 1978 Tambahan No. 61.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 409 tanggal 29 Juni 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047315.AH.01.02.TAHUN 2026 , tanggal 6 Juli 2026, sehubungan dengan

persetujuan penyesuaian dengan maksud dan tujuan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan berdomisili dan berkantor pusat di Jalan Raya Sultan Agung Km.28.5, Bekasi.

B. Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar , ruang lingkup kegiatan Perseroan mencakup jasa aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya sebagai entitas induk (*holding company*). Sementara itu, kegiatan usaha Entitas Anak bergerak di bidang industri wadah untuk keperluan farmasi, makanan, dan kosmetik; perdagangan umum (impor, ekspor, lokal, dan antar pulau); jasa pengangkutan (perbengkelan, ekspedisi, dan pergudangan); percetakan; perwakilan dan/atau keagenan; serta pekerjaan teknik dan layanan terkait lainnya.

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya sejak tahun 1977.

Hingga saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, kegiatan utama yang dijalankan oleh Perseroan dan Entitas Anak masih sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar Perseroan dan anggaran dasar Entitas Anak.

C. Entitas Anak Perseroan

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dan tidak langsung, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	Kedudukan dan tahun usaha komersial dimulai	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)
Kepemilikan Langsung			
PT Avesta Continental Pack (Avesta)	Bekasi, Jawa Barat, tahun komersial sejak 1976	Kemasan / wadah untuk keperluan farmasi, makanan, dan kosmetik	76,47%
Kepemilikan Tidak Langsung			
PT Indogravure*	Tangerang, Banten, tahun komersial sejak 1985	Kemasan / wadah untuk keperluan farmasi, makanan, dan kosmetik	61,49%

*Entitas Anak yang dimiliki secara tidak langsung melalui Avesta

Perseroan menyampaikan bahwa tidak terdapat dampak material, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap Entitas Anak Perseroan, baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan operasional Entitas Anak akan tetap berjalan sebagaimana biasa (*business as usual*), tanpa adanya perubahan dalam struktur kepemilikan, kegiatan usaha, maupun hubungan hukum dengan pelanggan, pemasok, dan pihak ketiga lainnya. Adapun secara tidak langsung, Rencana *Go Private* dan *Delisting* diharapkan dapat memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis Perseroan, yang pada akhirnya dapat mendukung pengembangan usaha Entitas Anak secara lebih optimal.

D. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 3 tanggal 1 September 2025, dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari

Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0073943.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 2 November 2025:

Modal Dasar	:	1.750.000.000 saham, bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham
Modal Ditempatkan dan Disetor	:	927.780.600 saham, bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham
Saham Portepel	:	822.219.400 saham, bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 16 Oktober 2026 yakni tanggal Suspensi Perdagangan Efek Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Kepemilikan di atas 5%				
1	PT Kingsford Holdings	772.122.420	38.606.121.000	83,22%
2	PT Kalbe Farma Tbk*	52.500.000	2.625.000.000	5,66%
Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan kurang dari 5%				
3	Masyarakat/Publik	103.158.180	5.157.909.000	11,12%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**927.780.600**	**46.389.030.000**	**100,00%**

*termasuk Pemegang Saham Independen / Publik

E. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini sesuai dengan Akta No. 3 tanggal 9 Juni 2026 dibuat di hadapan Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Indramayu, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0370727 tanggal 30 Juni 2026, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	:	Budi Dharma Wreksoatmodjo
Komisaris	:	Kentaro Sakamoto
Komisaris Independen	:	Dyah Sulistyandhari, S.H.

DIREKSI

Direktur Utama	:	Masanobu Ojima
Direktur	:	Yo Kubota
Direktur	:	Budi Santoso
Direktur	:	Hiroaki Emoto

F. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal dan untuk periode tahunan Perseroan yang berakhir pada setiap tanggal 31 Desember tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dan 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan nomor Laporan Auditor Independen berikut:

Periode	Nama Kantor Akuntan Publik	Partner KAP yang menandatangani	Tanggal Laporan Auditor Independen	Nomor Laporan Auditor Independen	Opini Audit

31 Desember 2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja	Benedikto Salim, CPA	16 Maret 2026	No. 00193/2.1505/AU.1/04/1561-5/1/III/2026	Wajar Tanpa Pengecualian
31 Desember 2024	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Benedikto Salim, CPA	21 Maret 2025	No. 00300/2.1032/AU.1/05/1561-4/1/III/2025	Wajar Tanpa Pengecualian
31 Desember 2023	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Benedikto Salim, CPA	18 Maret 2024	No. 00233/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/III/2024	Wajar Tanpa Pengecualian
31 Desember 2022	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Benedikto Salim, CPA	14 Maret 2023	No. 00228/2.1032/AU.1/04/1561-2/1/III/2023	Wajar Tanpa Pengecualian
31 Desember 2021	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Sandy, CPA	31 Maret 2022	No. 00384/2.1032/AU.1/04/1179-1/1/III/2022	Wajar Tanpa Pengecualian

(*dinyatakan dalam jutaan Rupiah*)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**	**31 Desember 2021**
Jumlah aset lancar	779.017	776.607	731.232	707.961	664.451
Jumlah aset tidak lancar	227.950	195.077	177.575	155.677	144.920
Jumlah Aset	1.006.967	971.684	908.807	863.638	809.371
Jumlah liabilitas jangka pendek	84.291	52.975	53.737	53.843	91.677
Jumlah liabilitas jangka panjang	30.056	24.856	23.234	22.866	26.226
Jumlah Liabilitas	114.347	77.831	76.971	76.709	117.903
Jumlah Ekuitas	892.620	893.853	831.836	786.929	691.468
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.006.967	971.684	908.807	863.638	809.371

(*dinyatakan dalam jutaan Rupiah*)

Laporan Laba Rugi Konsolidasian	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**	**31 Desember 2021**
Pendapatan Bersih	917.317	869.134	857.775	1.083.672	970.112
Laba Bruto	137.174	123.986	115.358	177.143	178.698
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	107.183	90.996	71.541	133.379	135.949
Laba Tahun Berjalan	86.487	72.474	56.643	102.314	104.034
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	84.422	72.904	55.801	103.967	104.524
Laba per saham – dasar	0,00006403 (Rp64,03)	0,00005407 (Rp54,07)	0,00003979 (Rp39,79)	0,00007352 (Rp73,52)	0,00007536 (Rp75,36)

Rasio Keuangan (Formula)	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**	**31 Desember 2023**	**31 Desember 2022**	**31 Desember 2021**
Rasio lancar (Aset Lancar / Liabilitas Jangka Pendek)	9,2x	14,7x	13,6x	13,1x	7,2x

Margin laba bersih (Laba Tahun Berjalan / Pendapatan Bersih × 100%)	9,4%	8,3%	6,6%	9,4%	10,7%
Pengembalian atas Aset (Laba Tahun Berjalan / Total Aset × 100%)	8,6%	7,5%	6,2%	11,8%	12,9%
Pengembalian atas Ekuitas (Laba Tahun Berjalan / Total Ekuitas × 100%)	9,7%	8,1%	6,8%	13,0%	15,0%
Rasio hutang terhadap modal (Total Liabilitas / Total Ekuitas)	0,13x	0,09x	0,09x	0,10x	0,17x
Rasio hutang terhadap Aset (Total Liabilitas / Total Aset)	0,11x	0,08x	0,08x	0,09x	0,15x

V. INFORMASI MENGENAI RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PUBLIK

A. Ringkasan Rencana Pembelian Kembali Saham Publik

Sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Pembelian Kembali Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik sesuai dengan ketentuan POJK 45/2024 dan POJK 29/2023.

Pembelian Kembali Saham merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual Saham yang dimilikinya sebelum perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan dilakukan setelah diperolehnya persetujuan yang diperlukan dalam RUPSLB.

B. Jumlah Saham dan Perkiraan Biaya Pembelian Kembali Saham

Perseroan sebagai pihak yang melakukan Pembelian Kembali Saham akan melakukan penawaran untuk melakukan Pembelian Kembali Saham sebanyak-banyaknya 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) Saham Publik, yang mewakili sekitar 16,78% (enam belas koma tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Perseroan telah mengalokasikan dana yang cukup untuk membeli kembali Saham Publik dengan harga Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) per saham atau sebesar Rp163.441.089.000 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah). Perseroan juga akan mengalokasikan dana yang diperlukan untuk segala biaya sehubungan dengan Pembelian Kembali Saham, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya yang mencakup biaya perantara perdagangan efek dan biaya penyelesaian transaksi sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

Nilai nominal per saham Saham Publik adalah Rp50 (lima puluh Rupiah), sehingga total nilai nominal saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan adalah Rp7.782.909.000 (tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu Rupiah).

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) POJK 45/2024, jumlah saham yang akan dibeli kembali dapat dilakukan sampai jumlah melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal disetor, sehingga jumlah pemegang saham tidak lebih dari 50 (lima puluh) pihak atau jumlah lain yang ditentukan OJK. Lebih lanjut, Pembelian Kembali Saham tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.

C. Harga Pembelian Kembali Saham

Harga Pembelian Kembali Saham yang ditawarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Publik adalah sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) per saham.

Penetapan harga per saham untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 36 huruf a POJK 45/2024, yaitu atas saham perusahaan terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di BEI, harga pembelian saham harus lebih tinggi dari harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB.

Rata-rata harga tertinggi perdagangan harian Saham Perseroan di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB adalah sebesar Rp474,37 (empat ratus tujuh puluh empat koma tiga tujuh Rupiah) per saham seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

No.	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No.	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	Selasa	04-Agu-2026	444,00	46	Jumat	18-Sep-2026	472,00
2	Rabu	05-Agu-2026	444,00	47	Sabtu	19-Sep-2026	**
3	Kamis	06-Agu-2026	444,00	48	Minggu	20-Sep-2026	**
4	Jumat	07-Agu-2026	448,00	49	Senin	21-Sep-2026	472,00
5	Sabtu	08-Agu-2026	**	50	Selasa	22-Sep-2026	470,00
6	Minggu	09-Agu-2026	**	51	Rabu	23-Sep-2026	466,00
7	Senin	10-Agu-2026	448,00	52	Kamis	24-Sep-2026	520,00
8	Selasa	11-Agu-2026	448,00	53	Jumat	25-Sep-2026	515,00
9	Rabu	12-Agu-2026	448,00	54	Sabtu	26-Sep-2026	**
10	Kamis	13-Agu-2026	446,00	55	Minggu	27-Sep-2026	**
11	Jumat	14-Agu-2026	468,00	56	Senin	28-Sep-2026	490,00
12	Sabtu	15-Agu-2026	**	57	Selasa	29-Sep-2026	484,00
13	Minggu	16-Agu-2026	**	58	Rabu	30-Sep-2026	480,00
14	Senin	17-Agu-2026	**	59	Kamis	01-Okt-2026	480,00
15	Selasa	18-Agu-2026	466,00	60	Jumat	02-Okt-2026	472,00
16	Rabu	19-Agu-2026	464,00	61	Sabtu	03-Okt-2026	**
17	Kamis	20-Agu-2026	470,00	62	Minggu	04-Okt-2026	**
18	Jumat	21-Agu-2026	478,00	63	Senin	05-Okt-2026	474,00
19	Sabtu	22-Agu-2026	**	64	Selasa	06-Okt-2026	480,00
20	Minggu	23-Agu-2026	**	65	Rabu	07-Okt-2026	476,00
21	Senin	24-Agu-2026	470,00	66	Kamis	08-Okt-2026	482,00
22	Selasa	25-Agu-2026	**	67	Jumat	09-Okt-2026	482,00
23	Rabu	26-Agu-2026	468,00	68	Sabtu	10-Okt-2026	**
24	Kamis	27-Agu-2026	474,00	69	Minggu	11-Okt-2026	**
25	Jumat	28-Agu-2026	472,00	70	Senin	12-Okt-2026	482,00
26	Sabtu	29-Agu-2026	**	71	Selasa	13-Okt-2026	474,00
27	Minggu	30-Agu-2026	**	72	Rabu	14-Okt-2026	474,00

28	Senin	31-Agu-2026	474,00	73	Kamis	15-Okt-2026	520,00
29	Selasa	01-Sep-2026	484,00	74	Jumat	16-Okt-2026	*
30	Rabu	02-Sep-2026	492,00	75	Sabtu	17-Okt-2026	**
31	Kamis	03-Sep-2026	490,00	76	Minggu	18-Okt-2026	**
32	Jumat	04-Sep-2026	488,00	77	Senin	19-Okt-2026	*
33	Sabtu	05-Sep-2026	**	78	Selasa	20-Okt-2026	*
34	Minggu	06-Sep-2026	**	79	Rabu	21-Okt-2026	*
35	Senin	07-Sep-2026	486,00	80	Kamis	22-Okt-2026	*
36	Selasa	08-Sep-2026	484,00	81	Jumat	23-Okt-2026	*
37	Rabu	09-Sep-2026	478,00	82	Sabtu	24-Okt-2026	**
38	Kamis	10-Sep-2026	476,00	83	Minggu	25-Okt-2026	**
39	Jumat	11-Sep-2026	472,00	84	Senin	26-Okt-2026	*
40	Sabtu	12-Sep-2026	**	85	Selasa	27-Okt-2026	*
41	Minggu	13-Sep-2026	**	86	Rabu	28-Okt-2026	*
42	Senin	14-Sep-2026	472,00	87	Kamis	29-Okt-2026	*
43	Selasa	15-Sep-2026	476,00	88	Jumat	30-Okt-2026	*
44	Rabu	16-Sep-2026	482,00	89	Sabtu	31-Okt-2026	**
45	Kamis	17-Sep-2026	474,00	90	Minggu	01-Nov-2026	**

Catatan: *Data di atas diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia*

* *Suspensi Saham*

** *Hari libur nasional atau cuti bersama*

Secara ringkas, premium yang ditawarkan dibandingkan dengan harga penawaran minimum berdasarkan POJK No. 45/2024 dan harga perdagangan historis dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Keterangan	Referensi Harga (Rp)	Harga Pembelian Kembali Saham (Rp)	Premium ditawarkan (%)
1	Nilai nominal saham	50	1.050	2.000%
2	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	474,37	1.050	121,35%
3	Harga penutupan Saham Perseroan sebelum pengumuman RUPSLB	510	1.050	105,88%
4	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan dari harga Saham Perseroan dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	468,27	1.050	124,23%
5	Harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian dalam jangka waktu 1 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	482,37	1.050	117,68%
6	Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian dalam jangka waktu 1 tahun terakhir sebelum pengumuman RUPSLB	489,98	1.050	114,29%

D. Pembatasan Periode Pembelian Kembali Saham

Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 33 ayat (2) POJK 45/2024, Perseroan akan menyelesaikan Pembelian Kembali Saham Publik dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini pertama kali diumumkan, yakni hingga tanggal 2 November 2027.

Pembelian Kembali Saham Publik akan dilakukan dalam beberapa periode, dengan ketentuan Perseroan akan menghentikan penawaran Pembelian Kembali Saham setelah berakhirnya suatu periode dan hasil jumlah pemegang saham berkurang menjadi kurang dari 50 (lima puluh) pihak atau setelah berakhirnya suatu periode dengan hasil jumlah pemegang saham masih lebih dari 50 (lima

puluh) pihak, namun Perseroan meyakini bahwa tidak akan ada lagi Pemegang Saham Publik menjual sahamnya, untuk yang terakhir setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik akan dibagi ke dalam 4 (empat) periode dengan jadwal pelaksanaan dan pembayaran untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham – I	10 Desember 2026 – 3 Februari 2027
Tanggal Pembayaran Periode I	15 Februari 2027
Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham – II	4 Februari – 4 Mei 2027
Tanggal Pembayaran Periode II	14 Mei 2027
Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham – III	5 Mei – 5 Agustus 2027
Tanggal Pembayaran Periode III	16 Agustus 2027
Periode Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham – IV	6 Agustus – 21 Oktober 2027
Tanggal Pembayaran Periode IV	2 November 2027

Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi terkait jadwal dan tanggal pembayaran secara berkala kepada masyarakat sebelum dimulainya setiap periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham berikutnya, yaitu sebelum Periode II, Periode III, dan Periode IV.

Apabila terdapat perubahan atas jadwal, ketentuan, atau hal material lainnya terkait pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, termasuk apabila Perseroan menghentikan penawaran Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan segera mengumumkan perubahan tersebut kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK sesuai dengan POJK 45/2024.

E. Metode Pembelian Kembali Saham dan Tata Cara Pengajuan Partisipasi Dalam Pembelian Kembali Saham

1. Pemegang Saham Yang Berhak untuk Berpartisipasi Dalam Pembelian Kembali Saham

Pemegang Saham yang berhak untuk berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham ("**Pemohon**") adalah seluruh Pemegang Saham Publik, yang saat ini memegang/memiliki 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham serta yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Pembelian Kembali Saham dan tidak mengajukan pembatalan atas permohonan yang telah disampaikannya sebelum Periode Pembelian Kembali Saham berakhir.

Pemohon harus terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan telah membuka Rekening Efek pada Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham, yaitu selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober 2027.

Dalam hal terdapat Pemegang Saham Publik yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (scrip) dan berencana untuk berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham, Pemegang Saham Publik wajib:

a. memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
b. telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
c. memastikan bahwa Saham Publik dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless*;
d. memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana Pemegang Saham Publik yang bersangkutan telah membuka rekening efek; dan

e. bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi Saham Publik menjadi bentuk *scripless*.

Para Pemegang Saham Perseroan yang Saham miliknya masih dalam bentuk warkat (*scrip*) dan belum memiliki sub-rekening efek dapat memperoleh informasi mengenai konversi saham menjadi tanpa warkat dengan menghubungi kontak Perseroan atau BAE Perseroan di bawah ini:

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK Jl. Raya Sultan Agung Km.28.5, Kp. Rawa Pasung, Kota Baru, Kota Bekasi, 17133 Telepon: (62-21) 884 0040 Email: corporate@champion.co.id U.p : - **Elbert Lo** (+62) 877 8002 8575 - **Hendra** (+62) 852 8782 6100	**PT ADIMITRA JASA KORPORA** Kirana Boutique Office Blok F3/5 Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Telepon: (+62) 21 29745222 Email: ipo.saham@adimitra-jk.co.id

2. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Formulir Pembelian Kembali Saham (FPKS)

a. Formulir Pembelian Kembali Saham

Pemegang Saham Publik yang berminat berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham wajib mengisi FPKS. FPKS beserta dokumen dan petunjuk pendukung pelaksanaan Pembelian Kembali Saham baru akan diterbitkan dan/atau disediakan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*, termasuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik. Setelah persetujuan diperoleh, FPKS dan dokumen terkait akan tersedia pada situs web Perseroan (https://champion.co.id/) pada tautan "Investor" dan/atau disampaikan kepada Pemegang Saham Publik melalui sarana komunikasi elektronik.

b. Tata Cara Pengajuan FPKS

FPKS wajib diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan beserta dokumen pendukung yang relevan dalam bentuk salinan elektronik (softcopy), termasuk hasil pemindaian (scan) dokumen yang telah ditandatangani, melalui email kepada BAE, perusahaan efek dan/atau bank kustodian masing-masing, dengan melampirkan:

i. Pemegang Saham individu
   - fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku;
   - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham berkewarganegaraan asing.

ii. Pemegang Saham berbadan hukum
   - fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
   - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.

Dalam hal FPKS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, surat kuasa yang telah ditandatangani dalam format yang dapat diterima oleh BAE wajib dilampirkan dalam bentuk salinan elektronik (softcopy) bersama FPKS dan dokumen pendukung lainnya. Untuk keperluan pengajuan partisipasi dalam Pembelian Kembali Saham, dokumen asli dalam bentuk fisik tidak diwajibkan untuk diserahkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan verifikasi yang disepakati dengan BAE dan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk.

Format surat kuasa untuk keperluan partisipasi dalam Pembelian Kembali Saham akan disediakan setelah persetujuan RUPSLB diperoleh, bersamaan dengan FPKS, melalui situs web Perseroan atau melalui kontak Perseroan atau BAE sebagaimana disebutkan di atas.

c. Verifikasi dan Bukti Penerimaan

FPKS dapat diserahkan kepada BAE atau perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Publik milik Pemohon disimpan. Setelah menyerahkan FPKS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE melalui alamat email ipo.saham@adimitra-jk.co.id, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Pembelian Kembali Saham yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

FPKS yang telah diisi dan ditandatangani beserta seluruh dokumen pendukung dapat disampaikan oleh Pemohon kepada BAE, perusahaan sekuritas dan/atau bank kustodian dimana Saham Publik milik Pemohon disimpan melalui email dalam bentuk softcopy sebagaimana diuraikan di atas. Perusahaan Sekuritas dan BAE akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan memberikan konfirmasi penerimaan atau tanda terima keikutsertaan dalam bentuk elektronik melalui email. Penyampaian FPKS tidak menggantikan kewajiban Pemohon untuk menyampaikan instruksi partisipasi melalui perusahaan efek/bank kustodian tempat Saham Publik milik Pemohon disimpan.

Selanjutnya, Pemohon harus menginstruksikan perusahaan efek/bank kustodian tempat Saham Publik miliknya disimpan untuk memasukkan instruksi partisipasi melalui menu Corporate Action (CA) di sistem *Central Depository and Book Entry Settlement System* ("**C-BEST**") KSEI dengan memilih event TEND dan opsi CASH, sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan KSEI. Setelah instruksi dimasukkan dan diotorisasi oleh perusahaan efek/bank kustodian, saham yang diikutsertakan akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan selama instruksi tersebut masih berlaku.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memasukkan dan mengotorisasi instruksi partisipasi pada event TEND dengan opsi CASH dalam sistem C-BEST sesuai batas waktu yang ditetapkan KSEI pada setiap Periode Pembelian Kembali Saham, permohonan partisipasi Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Publik yang telah berstatus "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan selama instruksi partisipasi masih berlaku, kecuali instruksi partisipasi tersebut dibatalkan oleh perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon sesuai dengan ketentuan pembatalan di bawah ini.

d. Pembatalan Permohonan Pembelian Kembali Saham

Sebelum berakhirnya setiap Periode Pembelian Kembali Saham, Pemohon yang telah mengajukan permohonan partisipasi dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Pembelian Kembali Saham untuk seluruh atau sebagian Saham Publik miliknya yang telah berstatus "Blocked for CA" melalui perusahaan efek/bank kustodian tempat Saham Publik tersebut disimpan, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui email beserta alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan kepada KSEI, sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya wajib menginstruksikan perusahaan efek/bank kustodian untuk membatalkan instruksi CASH pada event TEND melalui sistem C-BEST. Setelah instruksi pembatalan diproses dan diotorisasi sesuai dengan ketentuan KSEI,

status Saham Publik yang dibatalkan akan berubah dari "Blocked for CA" menjadi "Available", sehingga Saham Publik tersebut dapat kembali dialihkan atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pembayaran

Pada setiap Tanggal Pembayaran, KSEI akan melakukan penyelesaian atas Saham Publik milik Pemohon yang telah berstatus "Blocked for CA" dan telah diverifikasi serta disetujui untuk mengikuti Pembelian Kembali Saham, dengan melakukan pemindahbukuan Saham Publik tersebut ke rekening efek atas nama Perseroan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di KSEI.

Pembayaran Harga Pembelian Kembali Saham kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui sistem C-BEST dengan melakukan pemindahbukuan dana ke rekening perusahaan efek/bank kustodian masing-masing Pemohon yang disetujui untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemohon yang bersangkutan. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

f. Biaya Transaksi

Perseroan akan menanggung seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Pembelian Kembali Saham, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Pembelian Kembali Saham.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Pembelian Kembali Saham akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,1% dari hasil penjualan Saham, atau 0,6% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

g. Pembatalan Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham ini tidak dapat dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK atau tidak diperolehnya persetujuan Pemegang Saham Independen pada RUPSLB.

h. Pelaporan Hasil Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melaporkan hasil pembelian kembali saham kepada OJK dan publik secara berkala paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah setiap tanggal pembayaran.

F. Sumber Dana yang akan Digunakan Untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Berdasarkan saldo kas dan setara kas Perseroan per tanggal 28 Oktober 2026, Perseroan memiliki total dana kas sebesar Rp186.580.776.967,38 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tiga delapan Rupiah).

Perseroan memastikan bahwa sumber dana yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali Saham Publik seluruhnya merupakan dana internal Perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau hutang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi secara signifikan kemampuan keuangan Perseroan dalam

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Perseroan memperkirakan kebutuhan dana maksimum sebesar Rp163.441.089.000 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah) untuk membeli kembali Saham Publik yakni sebanyak 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili sekitar 16,78% (enam belas koma tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang menjadi obyek Pembelian Kembali Saham dengan harga pembelian kembali saham Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) per saham.

G. Perkiraan Penurunan Pendapatan Perseroan Akibat Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik dan Dampaknya Terhadap Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk dampak langsung terhadap penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan Perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Untuk keperluan pendanaan Pembelian Kembali Saham Publik termasuk biaya-biaya terkait dengan transaksi, Perseroan akan sepenuhnya menggunakan kas internal Perseroan, sehingga kas Perseroan diperkirakan berkurang sebanyak-banyaknya sebesar Rp163.441.089.000 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah biaya-biaya terkait.

H. Proforma Laba per Saham Perseroan Setelah Dilaksanakan Pembelian Kembali Saham Publik, Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2025, laba per saham Perseroan adalah sebesar Rp64,03 (enam puluh empat koma nol tiga Rupiah) dan diperkirakan setelah dilaksanakannya Pembelian Kembali Saham Publik adalah sebagai berikut:

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham Publik	Dampak △	Setelah Pembelian Kembali Saham Publik
Total Aset	1.006.967	-163.441	843.526
Total Ekuitas	892.620	-163.441	729.179
Laba Tahun Berjalan	86.487	-	86.487
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	84.422	-	84.422
Laba Per Saham Perseroan	0,00006403 (Rp64,03)	+0,00001298 +(Rp12,98)	0,00007701 (Rp77,01)
Pengembalian atas Aset (ROA)	8,6%	+1,7%	10,3%
Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	9,7%	+2,2%	11,9%

Informasi Proforma Keuangan di atas ditampilkan sebagai gambaran terkait dampak pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan secara penuh dana kas internal Perseroan hingga jumlah maksimum saham yang menjadi objek Pembelian Kembali Saham.

Penyesuaian proforma mencerminkan pengurangan total aset dan total ekuitas Perseroan sebesar nilai maksimum dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham. Dalam

penyusunan informasi keuangan proforma tersebut, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham serta potensi berkurangnya pendapatan bunga akibat penggunaan dana kas Perseroan tidak diperhitungkan, dengan asumsi bahwa dampaknya tidak material terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan dampak langsung terhadap pendapatan Perseroan.

I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Perseroan telah mempertimbangkan potensi dampak Pembelian Kembali Saham terhadap kondisi keuangan, likuiditas, kegiatan operasional, dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, mengingat Perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup untuk mendanai Pembelian Kembali Saham Publik bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Latar Belakang

RUPSLB mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pada pukul 10.00 WIB, yang akan dilaksanakan di Mitsui House Jakarta, Jl. Diponegoro No. 42, Menteng, Jakarta Pusat .

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) berdasarkan POJK 14/2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di situs web Perseroan (https://champion.co.id/) serta Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corporate@champion.co.id.

Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2026, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240.

Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2026, pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPSLB wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diperoleh di situs web Perseroan.

Pengumuman mengenai RUPSLB, beserta ringkasan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 2 November 2026 pada situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan, serta melalui surat kabar berbahasa Indonesia yakni Link Bisnis.

Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB akan diumumkan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 17 November 2026.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.

B. Agenda untuk RUPSLB

Agenda untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. **Agenda Pertama**: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*, yang meliputi:
    a. persetujuan atas pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari BEI;
    b. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
    c. persetujuan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagai implementasi pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*; dan
    d. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting,* termasuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. **Agenda Kedua**: Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Pertama mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen. Sementara itu, Agenda Kedua TIDAK mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen.

C. Persyaratan-Persyaratan Menurut Peraturan Perundang-Undangan untuk RUPSLB

Berdasarkan (i) POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020 dan (ii) Anggaran Dasar, prosedur untuk menyetujui keputusan atas mata acara yang akan dipertimbangkan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020. RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

2. Agenda Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK 15/2020 yang mensyaratkan kehadiran Para Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3

(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah dan keputusan sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB.

Persyaratan Kuorum

Dalam hal kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam RUPSLB untuk pengambilan keputusan atas masing-masing mata acara RUPSLB tidak tercapai, maka Perseroan dapat melangsungkan RUPSLB kedua dan ketiga dengan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

(i) RUPSLB Kedua

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB kedua.

2. Agenda Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham dengan kehadiran yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah.

Keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB kedua.

(ii) RUPSLB Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*

RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB ketiga.

2. Agenda Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

VII. KEWAJIBAN PERSETUJUAN DAN/ATAU PERMASALAHAN HUKUM

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dan/atau izin terlebih dahulu dari instansi pemerintah tertentu atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*. Tidak terdapat kewajiban memperoleh persetujuan atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga terkait rencana perubahan status Perseroan selain kepada masyarakat/publik.

Saat ini, tidak terdapat permasalahan hukum yang bersifat material maupun tidak material dan/atau tuntutan dari pihak ketiga yang sedang terjadi oleh Perseroan maupun Direksi dan Komisaris Perseroan.

VIII. PERKIRAAN TANGGAL-TANGGAL PENTING SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting* adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB kepada OJK	26 Oktober 2026
2.	Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Rencana *Go Private* dan *Delisting*	2 November 2026
3.	Tanggal DPS Pemegang Saham yang berhak hadir / Tanggal Pencatatan (*Recording Date*)	16 November 2026
4.	Pemanggilan RUPSLB	17 November 2026
5.	Penyelenggaraan RUPSLB	9 Desember 2026
6.	Penyelesaian Pembelian Kembali Saham Publik (sebagaimana dijelaskan pada Bab V bagian D di atas) paling lambat tanggal	2 November 2027
7.	Perkiraan persetujuan Menkum atas perubahan anggaran dasar Perseroan	15 November 2027
8.	Perkiraan permohonan pencabutan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik kepada OJK	16 November 2027
9.	Perkiraan OJK mencabut efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek bersifat Ekuitas dan/atau Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik	30 November 2027
10.	Perkiraan BEI membatalkan pencatatan Efek Perseroan	14 Desember 2027
11.	Perkiraan KSEI membatalkan penitipan kolektif Efek Perseroan	14 Desember 2027

IX. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris dengan ini menyatakan seluruh informasi material telah diungkapkan dan tidak menyesatkan.

X. INFORMASI LAIN

Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* dapat menghubungi Perseroan pada jam operasional melalui kontak berikut:

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK
Jalan Raya Sultan Agung Km.28.5, Kp. Rawa Pasung,
Kota Baru, Kota Bekasi, 17133
Telepon: (62-21) 884 0040
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat, 08.00 – 17.00 WIB
Website: https://champion.co.id/
Email: corporate@champion.co.id
Informasi Kontak
Elbert Lo (+62) 877 8002 8575 **Hendra** (+62) 852 8782 6100

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3/5
Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telepon: (+62) 21 29745222
Waktu Operasional: Senin s/d Jumat, 08.00 – 17.00 WIB
Email: ipo.saham@adimitra-jk.co.id

INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS IN CONNECTION WITH THE CHANGE OF STATUS FROM A PUBLIC COMPANY TO A PRIVATE COMPANY AND THE IMPLEMENTATION OF THE SHARE BUYBACK OF A PUBLIC COMPANY ("INFORMATION DISCLOSURE")

THIS INFORMATION DISCLOSURE HAS BEEN PREPARED IN CONNECTION WITH THE PLAN TO CHANGE THE STATUS OF PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK (THE "**COMPANY**") FROM A PUBLIC COMPANY TO A PRIVATE COMPANY, INCLUDING THE PLAN TO DELIST THE COMPANY'S SHARES FROM THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (THE "**GO PRIVATE AND DELISTING PLAN**"). THIS INFORMATION DISCLOSURE IS VERY IMPORTANT AND REQUIRES THE ATTENTION OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS.

TO ENSURE THAT THE INTERESTS OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS REMAIN PROTECTED, THE GO PRIVATE AND DELISTING PLAN IS CARRIED OUT IN ACCORDANCE WITH FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 45/POJK.04/2024 DATED 27 DECEMBER 2024 ON THE DEVELOPMENT AND STRENGTHENING OF ISSUERS AND PUBLIC COMPANIES ("**POJK 45/2024**"), FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION NO. 29/POJK.04/2023 DATED 29 DECEMBER 2023 ON THE BUYBACK OF SHARES ISSUED BY PUBLIC COMPANIES ("**POJK 29/2023**"), AND REGULATION NO. I-N ON THE DELISTING AND RELISTING OF SECURITIES, ANNEXED TO THE DECREE OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE INDONESIA STOCK EXCHANGE NO. KEP-0054/BEI/05-2024 DATED 6 MAY 2024 ("**IDX REGULATION NO. I-N**").

PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Business Activities
Consultation Business Management and Other Business

Domiciled in Bekasi, Indonesia

Address
Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5, Kp. Rawa Pasung,
Kota Baru, Bekasi City, 17133
Telephone: (62-21) 884 0040
Website: https://champion.co.id/ ; Email: corporate@champion.co.id

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION FOR THE SHAREHOLDERS IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S PLAN TO:

(i) TO DELIST THE COMPANY'S SHARES FROM THE INDONESIA STOCK EXCHANGE;
(ii) TO CHANGE THE STATUS OF THE COMPANY FROM A PUBLIC COMPANY TO A PRIVATE COMPANY;
(iii) TO IMPLEMENT A SHARE BUYBACK IN CONNECTION WITH THE PROPOSED GO PRIVATE AND DELISTING OF THE COMPANY; AND
(iv) TO AMEND THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION IN CONNECTION WITH THE PROPOSED GO PRIVATE AND DELISTING OF THE COMPANY.

The announcement of the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**") and the Information Disclosure to Shareholders was made on 2 November 2026 on the websites of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**"), the Indonesian Central Securities Depository ("**KSEI**"), and the Company, as well as in Indonesian-language newspaper, namely Link Bisnis. The EGMS is scheduled to be held on Wednesday, 9 December 2026 from 10.00 WIB until completion, at Mitsui House Jakarta, Jl. Diponegoro No. 42, Menteng, Jakarta Pusat. The notice of the EGMS to the shareholders will be announced on 17 November 2026 by the Company on the websites of the IDX, the KSEI, and the Company. In the event of any additions and/or changes to the Information Disclosure, the Company will make an announcement no later than 2 (two) business days prior to the date of the EGMS.

The Company will also hold the EGMS electronically through the KSEI Electronic General Meeting System ("**eASY.KSEI**") pursuant to Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation Number 14 of 2025 on the Electronic Conduct of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("**POJK 14/2025**").

The Company will also carry out a Share Buyback following approval at the EGMS, covering all shares of the Company held by Public Shareholders, comprising 155,658,180 (one hundred fifty-five million six hundred fifty-eight thousand one hundred eighty) shares, representing approximately 16.78% (sixteen point seven eight percent) of the Company's total issued and fully paid-up shares, which shall be subject to the Share Buyback at a purchase price of Rp1,050 (one thousand fifty Rupiah) per share.

Appointed Securities Company

PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk, Lantai 12, Jl. Hayam Wuruk , No. 8, Jakarta
Telephone: 021-80632800 | Fax: 021-3840041

If you have any doubt about any aspect of this Information Disclosure or about the action you should take, you may consult your securities broker representative or registered securities company representative, investment manager, legal adviser, accountant, or other professional adviser.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND JOINTLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS, AND, HAVING CAREFULLY STUDIED IT, CONFIRM THAT, TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE ARE NO OTHER MATERIAL AND RELATED FACTS THAT HAVE NOT BEEN DISCLOSED OR HAVE BEEN OMITTED SUCH THAT THE INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS WOULD BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.

THIS INFORMATION DISCLOSURE WAS ISSUED IN JAKARTA ON 2 NOVEMBER 2026
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY

I. DEFINITIONS

In this Information Disclosure, unless the context requires otherwise, the terms in this section have the following meanings:

Affiliate as defined under P2SK Law, namely:

a. family relationship by marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with:
   1. the husband or wife;
   2. the parents of the husband or wife and the husband or wife of the child;
   3. the grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchild;
   4. the sibling of the husband or wife and the spouse of that sibling; or
   5. the husband or wife of the person concerned and his or her sibling.
b. family relationship by descent up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with:
   1. the parents and children;
   2. the grandparents and grandchildren; or
   3. the siblings of the person concerned.
c. the relationship between a party and its employee, director, or commissioner, and that party;
d. the relationship between 2 (two) or more companies in which there are one or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors in common;
e. the relationship between a company and a party that, directly or indirectly, in any manner, controls or is controlled by that company or party in determining the management and/or policies of the company or the party concerned;
f. the relationship between 2 (two) or more companies that are controlled, directly or indirectly, in any manner, by the same party in determining the management and/or policies of the companies; or
g. the relationship between a company and its major shareholder, namely a party that directly or indirectly holds at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights in that company.

Public Accountant means the Public Accounting Firm KAP Purwantono Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) as the independent auditor that audits the Consolidated Company's Financial Statements for period ending 31 December 2021, 2022, 2023 and 2024 as well as KAP Purwanto Susanti dan Surja (Ernst & Young) as the independent auditor that audits the Consolidated Company's Financial Statements for period 31 December 2025.

Subsidiaries means companies in the form of legal entities whose shares are owned, directly or indirectly, by the Company, in which the Company's ownership is more than 50% (fifty percent) of all issued and paid-up shares in those companies, and whose financial statements are consolidated into the Company's financial statements.

Articles of Association means the Company's Articles of Association as of the date of the Information Disclosure, as stated in the Deed No. 195 dated 30 October 1975, made before Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notary in Jakarta, which has been ratified by the MOL pursuant to Decree No. Y.A.5/215/9 dated 27 June 1978, and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 473 dated 1 August 1978, Supplement No. 61, as lastly amended by Deed No. 409 dated 29 June 2026, made before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, which has been approved by the MOL pursuant to Decree No. AHU-0047315.AH.01.02.TAHUN 2026, dated 6 July 2026, relating to the approval of the adjustment of the purpose and objectives in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification.

IDX means PT Bursa Efek Indonesia.

Securities Administration Bureau or **BAE** means PT Adimitra Jasa Korpora, being the securities administration bureau appointed by the Company to administer the Company's securities.

Register of Shareholders means the register of the Company's shareholders maintained by the Securities Administration Bureau.

Delisting means the removal of securities from the list of securities listed on the IDX in accordance with IDX Regulation No. I-N.

Board of Commissioners means the Board of Commissioners of the Company.

Board of Directors means the Board of Directors of the Company.

FPKS means the Share Buyback Application Form (Formulir Pembelian Kembali Saham).

Share Buyback Price means the price offered by the Company, being Rp1,050 (one thousand and fifty Rupiah), as defined in Chapter V, Information on the Public Share Buyback Plan, Section C of this Information Disclosure.

Business Day means Monday to Friday, except national holidays, collective leave days, and non-trading days determined by the government of the Republic of Indonesia, or ordinary working days determined by the government of the Republic of Indonesia as holidays and on which banks are open to conduct business in Indonesia.

Share Buyback Term means the overall term for the implementation of the Share Buyback, namely a maximum of 12 (twelve) months from the date this Information Disclosure is first announced, that is, up to 2 November 2027.

Information Disclosure means this Information Disclosure addressed to the Shareholders of the Company, issued on 2 November 2026.

KSEI means the Indonesian Central Securities Depository (Kustodian Sentral Efek Indonesia).

MOL means the Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Minister of Justice of the Republic of Indonesia, the Minister of Law and Legislation of the Republic of Indonesia, the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia, or the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia).

OJK means the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), an independent institution having the functions, duties, and authority of regulation, supervision, inspection, and investigation as referred to in Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.

Shareholders or **Shareholder** means the shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Register of Shareholders issued by the Securities Administration Bureau.

Independent Shareholders means shareholders who do not have a personal economic interest in a particular transaction and who: (a) are not members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers; or (b) are not Affiliates (as defined in the P2SK Law) of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers (as defined in POJK 15/2020 and POJK 45/2024).

Public Shareholders means shareholders of the Company whose shares are subject to the Share Buyback in connection with the proposed change in the Company's status from a Public Company to a Private Company, as referred to in POJK 45/2024.

Share Buyback means an offer through mass media to acquire equity securities by purchasing them from the Public Shareholders, to be carried out by the Company in connection with the change of status from a public company to a private company. The offer will be made in accordance with POJK 45/2024 and POJK 29/2023.

Applicant or Applicants means Public Shareholders who have completed and submitted all documents required for this Share Buyback before the Payment Date, no later than 21 October 2027 at 16:00 WIB.

Controller means a party that, directly or indirectly:

a. owns more than 50% (fifty percent) of all fully paid-up shares with voting rights of a Public Company; or
b. has the ability to determine, directly or indirectly, in any manner, the management and/or policies of a Public Company.

IDX Regulation No. I-N means Regulation No. I-N on the Delisting and Relisting of Securities, annexed to the Decree of the Board of Directors of the IDX No. Kep-0054/BEI/05-2024 dated 6 May 2024.

Share Buyback Period means each period for the implementation of the Share Buyback conducted by the Company after obtaining the approval of the EGMS, as described in Chapter V, Information on the Public Share Buyback Plan, Section D of this Information Disclosure.

Registration Statement means the document that must be submitted to the OJK by the Company in connection with a public offering or by a public company pursuant to OJK Regulation No. 7/POJK.04/2017 on the Registration Statement Documents for Public Offerings of Equity Securities, Debt Securities, and/or Sukuk.

Company means **PT Champion Pacific Indonesia Tbk**, a public limited liability company whose shares are listed on the IDX, established under and subject to the laws of the Republic of Indonesia, and domiciled in Bekasi, Indonesia.

Appointed Securities Company means PT Equity Sekuritas Indonesia, a securities company that is an IDX exchange member and is registered as a member of the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI) and KSEI, appointed by the Company to act for and on behalf of the Company in carrying out the Share Buyback, including receiving and verifying participation applications and making payment of the Share Buyback Price to the Public Shareholders through KSEI.

PMK 81/2024 means Minister of Finance Regulation No. 81 of 2024, dated 14 October 2024, on Tax Provisions in the Framework of the Implementation of the Core Tax Administration System, as most recently amended by Minister of Finance Regulation No. 1 of 2026, dated 22 January 2026, on the Fourth Amendment to Minister of Finance Regulation No. 81 of 2024 on Tax Provisions in the Framework of the Implementation of the Core Tax Administration System.

POJK 14/2025 means OJK Regulation No. 14 of 2025, dated 1 July 2025, on the Electronic Conduct of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders.

POJK 15/2020 means OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, dated 21 April 2020, on the Plan and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies.

POJK 29/2023 means OJK Regulation No. 29/POJK.04/2023, dated 29 December 2023, on the Buyback of Shares Issued by Public Companies.

POJK 45/2024 means OJK Regulation No. 45/POJK.04/2024, dated 27 December 2024, on the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies.

Go Private and Delisting Plan means the plan to change the status of the Company from a public company to a private company, including the Delisting plan.

EGMS means the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 9 December 2026 in connection with the Go Private and Delisting Plan and the amendment of the Articles of Association and, if necessary, any subsequent EGMS (at a time to be determined)

Rp means the lawful currency of the Republic of Indonesia at present.

Shares means the shares of the Company currently listed on the IDX as of the date of this Information Disclosure.

Public Shares means all shares of the Company owned by the Public Shareholders, being 155,658,180 (one hundred fifty-five million six hundred fifty-eight thousand one hundred eighty) shares, or approximately 16.78% (sixteen point seven eight percent) of all issued and fully paid-up shares in the Company, which are the object of the Share Buyback.

Trading Suspension means the suspension of trading of the Company's Shares on the IDX announced by the IDX pursuant to letter No.: PENG-SPT-00020/BEI.PP2/10-2026 on 16 October 2026.

EGMS Invitation Date means 17 November 2026, being the date on which the Company formally issues the notice to the Shareholders to attend the EGMS, containing information on the time, venue, meeting agenda, and the procedures for attendance and voting at the EGMS in accordance with applicable provisions and regulations.

Payment Date means the date on which the Share Buyback Price is paid to Applicants whose applications have been verified and approved, through the Appointed Securities Company and KSEI, for each Share Buyback Period, namely 15 February 2027 for Period I, 14 May 2027 for Period II, 16 August 2027 for Period III, and 2 November 2027 for Period IV, as described in Chapter V, Section D of this Information Disclosure.

Recording Date means 16 November 2026, being the date used to determine the Shareholders entitled to attend and vote at the EGMS, namely the Shareholders recorded in the Register of Shareholders 1 (one) Business Day prior to the date of the notice of the EGMS.

Capital Market Law means Law No. 8 of 1995, dated 10 November 1995, on the Capital Market, as partially amended by Law No. 4 of 2023, dated 12 January 2023, on the Development and Strengthening of the Financial Sector.

Company Law means Law No. 40 of 2007, dated 16 August 2007, on Limited Liability Companies, as partially amended by Law No. 6 of 2023, dated 31 March 2023, on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law.

P2SK Law means Law No. 4 of 2023, dated 12 January 2023, on the Development and Strengthening of the Financial Sector, as amended by Law No. 4 of 2026 on Amendments to Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.

WIB means Western Indonesian Time.

II. INTRODUCTION

A. Purpose and Objectives of the Information Disclosure

This Information Disclosure is submitted for the purpose of providing information to the Shareholders regarding:

- The plan to change the status of the Company from a public company to a private company, including the delisting of the Company's shares from the IDX;
- An overview of the legal provisions and requirements that must be met in implementing the Go Private and Delisting Plan;
- The plan to buy back shares held by the Public Shareholders in connection with the implementation of the Go Private and Delisting Plan; and
- Information on the conduct of the EGMS, including the procedures for attendance and voting in connection with the Go Private and Delisting Plan.

B. Background of the Go Private and Delisting Plan

In connection with the Go Private and Delisting Plan, the Company submitted letter No. 075/CPI/DIR/X/2026 dated 15 October 2026 regarding the Application for Delisting and Application for Suspension of the Company's Securities to the IDX and the OJK, which sets out the Company's plan to Go Private and Delist.

Subsequently, on 16 October 2026, the IDX, through Announcement No. PENG-SPT-00020/BEI.PP2/10-2026, decided to temporarily suspend trading of the Company's securities on the IDX in all markets, effective from the Pre-Opening Session of Securities Trading on 16 October 2026 until further announcement by the IDX.

The Company has also submitted an initial information disclosure to the public in connection with the temporary suspension of securities trading and the Go Private and Delisting Plan on 16 October 2026 through the websites of the IDX and the Company.

As a follow-up to the foregoing, the Company submits this Information Disclosure in connection with the implementation of the Go Private and Delisting Plan, having regard to and complying with the provisions of POJK 45/2024, POJK 29/2023, and IDX Regulation No. I-N.

III. INFORMATION ON THE GO PRIVATE AND DELISTING PLAN

A. Reasons and Objectives of the Go Private and Delisting Plan

The Company intends to implement the Go Private and Delisting Plan for the following reasons and objectives:

a. The Company is a holding company that conducts business activities through subsidiaries in various sectors, including the packaging industry for pharmaceutical, food, and cosmetic purposes, general trading, transportation services, printing, and other related business activities. To support long-term business development, the Company plans to restructure and optimize its business strategy in order to improve operational efficiency and business competitiveness;

b. The Company intends to have flexibility in conducting its business activities, including efforts to improve efficiency by increasing productivity and operational performance as well as business development;

c. The Company has no plan to access funding through the capital market, either in the near term or in the future, and therefore considers that public company status is no longer necessary to support the Company's funding needs and business development strategy; and

d. The Company's Shares are not actively traded on the IDX, with limited trading frequency and volume over certain periods and minimal market transaction activity, which results in the stock market functioning less than optimally as a means of liquidity for the Public Shareholders.

In line with item (d) above, because trading in the Company's Shares is relatively illiquid, it is not easy for the Public Shareholders to transact their Shares through the IDX. With the Go Private and Delisting Plan, the public shareholders have the opportunity to sell their Shares through the share buyback by the Company at the Share Buyback Price as set out in Chapter V Section C below.

B. Overview and Requirements for Implementing the Go Private and Delisting Plan

The Go Private and Delisting Plan is a plan to change the status of the Company from a public company to a private company, which includes the delisting of the Company's Shares from the IDX and the amendment of the Company's Articles of Association in connection with the change of status.

The Go Private and Delisting Plan will be implemented having regard to the provisions of POJK 45/2024, POJK 29/2023, and IDX Regulation No. I-N.

In this regard, the implementation of the Go Private and Delisting Plan comprises the following main stages and requirements:

1. Approval of the Independent Shareholders

The Go Private and Delisting Plan must first obtain the approval of the Independent Shareholders at the EGMS in accordance with the applicable quorum and decision-making requirements.

2. Implementation of the Public Share Buyback

In connection with the implementation of the Go Private and Delisting Plan, the Company will buy back the Shares held by the Public Shareholders after obtaining the approval of the Independent Shareholders at the EGMS.

Further information on the Share Buyback plan, including the price, period, implementation mechanism, and source of funds, is set out in Chapter V of this Information Disclosure.

3. Fulfilment of the Requirements for the Change of the Company's Status

The Company must fulfil the other requirements for the planned change of status from a public company to a private company as stipulated in POJK 45/2024.

4. Delisting of the Shares from the IDX and Amendment of the Articles of Association

The Company will carry out the process of delisting its Shares from the IDX and amending the Articles of Association in connection with the change of the Company's status to a private company, after obtaining the approval of, and fulfilling all requirements applicable from, the OJK and the IDX.

C. Benefits of the Go Private and Delisting Plan to the Public Shareholders

The Go Private and Delisting Plan is expected to provide the Public Shareholders with an opportunity to sell their shares through the share buyback mechanism by the Company.

1. Attractive Share Buyback Price

In the event the Go Private and Delisting Plan is approved by the EGMS, the Company plans to carry out the Share Buyback at an attractive share buyback price that is higher than the minimum offer price determined in accordance with the pricing provisions set out in POJK 45/2024 and POJK 29/2023.

Further information on the public Share Buyback plan, including the price, period, implementation mechanism, and source of funds, is set out in Chapter V of this Information Disclosure.

2. Payment of Transaction Costs/Commissions to Securities Brokers by the Company

The Company will pay all costs relating to the Share Buyback transactions, including transaction commissions through the IDX and KSEI fees, but excluding applicable taxes imposed on the Public Shareholders as a result of the sale of their Shares in the Share Buyback.

3. Tax Consequences

Public Shareholders who sell their Shares in scripless form during the Share Buyback will only be subject to a withholding tax of 0.1% (zero point one percent) of the gross transaction value of the share sale, or 0.6% (zero point six percent) if the Shares sold are founders' Shares, in accordance with prevailing tax laws, including Government Regulation Number 41 of 1994 as amended by Government Regulation Number 14 of 1997 and PMK 81/2024.

In the event that the Company's shares are delisted from the IDX, Public Shareholders who do not participate in the Share Buyback will remain shareholders of a company that are no longer listed on the IDX. Accordingly, such Public Shareholders will no longer be able to sell their Shares through the IDX. If Shareholders intend to sell their Shares after the Company's Shares are no longer listed on the IDX, any income derived from such sale may be subject to Income Tax in accordance with the prevailing tax laws and regulations, including Law No. 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations. For resident corporate taxpayers, gains arising from the sale of shares will be subject to Corporate Income Tax at a rate of 22% (twenty-two percent). Meanwhile, for resident individual taxpayers, gains arising from the sale of shares will be subject to progressive Personal Income Tax rates ranging from 5% (five percent) to a maximum of 35% (thirty-five percent). For non-resident taxpayers other than permanent establishments, as stipulated under Article 238 of PMK 81/2024, the sale of the Company's shares following their delisting from the IDX may be subject to final Income Tax under Article 26 at a rate of 20% (twenty percent) of the estimated net income. Such estimated net income is determined at 25% (twenty-five percent) of the selling price, resulting in an effective Income Tax rate of 5% (five percent) of the share selling price, unless an exemption or relief is available under an applicable Double Taxation Avoidance Agreement.

ALL SHAREHOLDERS ARE ADVISED TO CONSULT WITH THEIR RESPECTIVE TAX ADVISERS TO DETERMINE THE TAX CONSEQUENCES THAT MAY ARISE IN CONNECTION WITH THE SALE OF THEIR SHARES IN THE COMPANY.

D. Consequences of the Go Private and Delisting Plan for the Public Shareholders

If the Go Private and Delisting Plan has obtained all required approvals and all applicable requirements have been met, the Company will change its status from a public company to a private company and the Company's shares will no longer be listed and traded on the IDX.

In this regard, Public Shareholders who do not participate in the Share Buyback and continue to hold shares in the Company after completion of the Go Private and Delisting process will remain shareholders of the Company, which will have the status of a private company.

Accordingly, such Public Shareholders should note the following consequences:

a. The Company's shares can no longer be traded through the IDX, so the opportunity to sell shares through exchange trading mechanisms will no longer be available;
b. The liquidity of the Company's shares may become more limited because the transfer of shares after Delisting must be carried out through off-exchange mechanisms in accordance with applicable provisions; and
c. The transfer of shares after the Company has the status of a private company may have different tax consequences compared with share transactions through the IDX, in accordance with applicable tax provisions.

Therefore, the Public Shareholders are encouraged to carefully consider the benefits and consequences of the Go Private and Delisting Plan before making a decision regarding their shareholding in the Company.

IV. INFORMATION ON THE COMPANY

A. Brief History of the Company

The Company was established under the name PT Igar Jaya based on Deed No. 195 dated 30 October 1975 made before Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notary in Jakarta, which has been ratified by the MOL pursuant to Decree No. Y.A.5/215/9 dated 27 June 1978, and published in the Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 473 dated 1 August 1978, Supplement No. 61.

The Company's articles of association have been amended several times, most recently by Deed No. 409 dated 29 June 2026, made before Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in West Jakarta, which has been approved by the MOL pursuant to Decree No. AHU-0047315.AH.01.02.TAHUN 2026 dated 6 July 2026, relating to the approval of the adjustment of the purpose and objectives in accordance with the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification.

As of the date of issuance of this Information Disclosure, the Company is domiciled and has its head office at Jalan Raya Sultan Agung Km 28.5, Bekasi.

B. Business Activities of the Company and Subsidiaries

Pursuant to Article 3 of the Articles of Association, the scope of the Company's activities includes other management consulting services as a holding company. Meanwhile, the subsidiaries' business activities are in the container industry for pharmaceutical, food, and cosmetic purposes; general trading (import, export, local, and inter-island); transportation services (workshop, expedition, and warehousing); printing; representation and/or agency; and engineering works and other related services.

The Company commenced its commercial business activities in 1977.

As of the date of issuance of this Information Disclosure, the main activities carried out by the Company and its Subsidiaries remain in line with the scope of business activities under the Company's Articles of Association and its subsidiaries' articles of association, respectively.

C. Subsidiaries of the Company

As of the date of issuance of this Information Disclosure, the Company has Subsidiaries owned directly and indirectly, with details as follows:

Subsidiaries	Domicile and year commercial operations commenced	Business Activities	Ownership (%)
Direct Ownership			
PT Avesta Continental Pack (Avesta)	Bekasi, West Java, commercial operations since 1976	Packaging / containers for pharmaceutical, food, and cosmetic purposes	76.47%
Indirect Ownership			
PT Indogravure*	Tangerang, Banten, commercial operations since 1985	Packaging / containers for pharmaceutical, food, and cosmetic purposes	61.49%

*Subsidiary indirectly owned through Avesta

The Company states that there is no material impact, either direct or indirect, on the Company's Subsidiaries, whether owned directly or indirectly. The Subsidiaries' operations will continue as usual (business as usual), without any change in ownership structure, business activities, or legal relationships with customers, suppliers, and other third parties. Indirectly, the Go Private and Delisting Plan is expected to provide greater flexibility in the Company's strategic decision-making, which in turn can support the development of the Subsidiaries' businesses more optimally.

D. Capital Structure and Composition of Shareholders

The Company's capital structure as of the date of this Information Disclosure is as set out in Deed No. 3 dated 1 September 2025, made before Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notary in Indramayu Regency, which has been approved by the MOL pursuant to Decree No. AHU-0073943.AH.01.02.TAHUN 2025 dated 2 November 2025:

Authorized Capital	:	1,750,000,000 shares, with a nominal value of Rp50 (fifty Rupiah) per share
Issued and Paid-Up Capital	:	927,780,600 shares, with a nominal value of Rp50 (fifty Rupiah) per share
Unissued Shares (*Portepel*)	:	822,219,400 shares, with a nominal value of Rp50 (fifty Rupiah) per share

Based on the Register of Shareholders as of 16 October 2026, being the date of the Trading Suspension of the Company's Securities, the composition of the Company's shareholders is as follows:

No	Shareholder	Shares	Nominal Value (Rp)	%
Ownership above 5%				
1	PT Kingsford Holdings	772,122,420	38,606,121,000	83.22%
2	PT Kalbe Farma Tbk*	52,500,000	2,625,000,000	5.66%
Other shareholders with ownership below 5%				
3	Public	103,158,180	5,157,909,000	11.12%
Total Issued and Fully Paid-Up Capital		**927,780,600**	**46,389,030,000**	**100.00%**

*included as Independent / Public Shareholders

E. Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors as of the date of this Information Disclosure, as reflected in the Deed No. 3 dated June 2026, made before Melissa Tracyana Liem, S.H., M.Kn., Notary in Indramayu Regency, which has been notified to the MOL pursuant to the Notification Receipt Letter on Company's Data Changes No. AHU-AH.01.09-0370727 dated 30 June 2026, is as follows:

BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner	:	Budi Dharma Wreksoatmodjo
Commissioner	:	Kentaro Sakamoto
Independent Commissioner	:	Dyah Sulistyandhari, S.H.

BOARD OF DIRECTORS

President Director	:	Masanobu Ojima
Director	:	Yo Kubota
Director	:	Budi Santoso
Director	:	Hiroaki Emoto

F. Summary of Key Financial Data

The following is a summary of the Company's consolidated financial position and results as of and for the Company's financial years ended 31 December 2025, 2024, 2023, 2022, and 2021, which have been audited by the Public Accountant with the following Independent Auditor's Report numbers:

Period	Name of Public Accounting Firm	Signing Partner of the Firm	Date of Independent Auditor's Report	Independent Auditor's Report Number	Audit Opinion
31 December 2025	KAP Purwanto Susanti dan Surja	Benedikto Salim, CPA	16 March 2026	No. 00193/2.1505/AU.1/04/ 1561-5/1/III/2026	Unqualified Opinion
31 December 2024	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Benedikto Salim, CPA	21 March 2025	No. 00300/2.1032/AU.1/05/ 1561-4/1/III/2025	Unqualified Opinion
31 December 2023	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Benedikto Salim, CPA	18 March 2024	No. 00233/2.1032/AU.1/05/ 1561-3/1/III/2024	Unqualified Opinion
31 December 2022	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Benedikto Salim, CPA	14 March 2023	No. 00228/2.1032/AU.1/04/ 1561-2/1/III/2023	Unqualified Opinion

31 December 2021	KAP Purwantono Sungkoro dan Surja	Sandy, CPA	31 March 2022	No. 00384/2.1032/AU.1/04/ 1179-1/1/III/2022	Unqualified Opinion

(in millions of Rupiah)

Consolidated Statements of Financial Position	31 December 2025	31 December 2024	31 December 2023	31 December 2022	31 December 2021
Total current assets	779,017	776,607	731,232	707,961	664,451
Total non-current assets	227,950	195,077	177,575	155,677	144,920
Total Assets	1,006,967	971,684	908,807	863,638	809,371
Total current liabilities	84,291	52,975	53,737	53,843	91,677
Total non-current liabilities	30,056	24,856	23,234	22,866	26,226
Total Liabilities	114,347	77,831	76,971	76,709	117,903
Total Equity	892,620	893,853	831,836	786,929	691,468
Total Liabilities and Equity	1,006,967	971,684	908,807	863,638	809,371

(in millions of Rupiah)

Consolidated Statements of Profit or Loss	31 December 2025	31 December 2024	31 December 2023	31 December 2022	31 December 2021
Net Revenue	917,317	869,134	857,775	1,083,672	970,112
Gross Profit	137,174	123,986	115,358	177,143	178,698
Profit Before Income Tax	107,183	90,996	71,541	133,379	135,949
Net Income	86,487	72,474	56,643	102,314	104,034
Total Comprehensive Income for the Year	84,422	72,904	55,801	103,967	104,524
Earnings per share – basic	0.00006403 (Rp64.03)	0.00005407 (Rp54.07)	0.00003979 (Rp39.79)	0.00007352 (Rp73.52)	0.00007536 (Rp75.36)

Financial Ratios (Formula)	31 December 2025	31 December 2024	31 December 2023	31 December 2022	31 December 2021
Current ratio (Current Assets / Current Liabilities)	9.2x	14.7x	13.6x	13.1x	7.2x
Net profit margin (Net Income / Net Revenue × 100%)	9.4%	8.3%	6.6%	9.4%	10.7%
Return on Assets (Net Income / Total Assets × 100%)	8.6%	7.5%	6.2%	11.8%	12.9%
Return on Equity (Net Income / Total Equity × 100%)	9.7%	8.1%	6.8%	13.0%	15.0%
Debt to equity ratio (Total Liabilities / Total Equity)	0.13x	0.09x	0.09x	0.10x	0.17x

Debt to assets ratio (Total Liabilities / Total Assets)	0.11x	0.08x	0.08x	0.09x	0.15x

V. INFORMATION ON THE PUBLIC SHARE BUYBACK PLAN

A. Summary of the Public Share Buyback Plan

In connection with the Go Private and Delisting Plan, the Company intends to carry out the Share Buyback of the shares held by the Public Shareholders in accordance with POJK 45/2024 and POJK 29/2023.

The Share Buyback is part of the implementation of the Go Private and Delisting Plan, which aims to provide the Public Shareholders with an opportunity to sell their Shares before the Company's status changes from a public company to a private company.

The Share Buyback will be carried out after the required approval has been obtained at the EGMS.

B. Number of Shares and Estimated Cost of the Share Buyback

The Company, as the party conducting the Share Buyback, will make an offer to carry out the Share Buyback of up to 155,658,180 (one hundred fifty-five million six hundred fifty-eight thousand one hundred eighty) Public Shares, representing approximately 16.78% (sixteen point seven eight percent) of all issued and fully paid-up shares in the Company.

The Company has allocated sufficient funds to buy back the Public Shares at a price of Rp1,050 (one thousand and fifty Rupiah) per share, or a total of Rp163,441,089,000 (one hundred sixty three billion four hundred forty one million eighty nine thousand Rupiah). The Company will also allocate the funds required for all costs in connection with the Share Buyback, including but not limited to securities brokerage costs and transaction settlement costs in connection with the implementation of the Share Buyback.

The nominal value per Public Share is Rp50 (fifty Rupiah), such that the total nominal value of the shares to be bought back by the Company is Rp7,782,909,000 (seven billion seven hundred eighty-two million nine hundred nine thousand Rupiah).

In accordance with Article 35 paragraph (2) of POJK 45/2024, the number of shares to be bought back may exceed 10% (ten percent) of the paid-up capital, such that the number of shareholders does not exceed 50 (fifty) parties or any other number determined by the OJK. Furthermore, the Share Buyback does not result in the Company's net worth decreasing below the sum of its paid-up capital and the mandatory reserves that have been allocated.

C. Share Buyback Price

The Share Buyback Price offered by the Company to the Public Shareholders is Rp1,050 (one thousand and fifty Rupiah) per share.

The determination of the price per share for the implementation of the Share Buyback is made by reference to the provisions of Article 36 letter a of POJK 45/2024, namely that for shares of a public company that are listed and traded on the IDX, the share purchase price must be higher than the average of the highest daily trading prices on the Stock Exchange over the last 90 (ninety) days prior to the date of announcement of the EGMS.

The average of the highest daily trading prices of the Company's Shares on the IDX over the last 90 (ninety) days prior to the date of announcement of the EGMS is Rp474.37 (four hundred seventy-four point three sevenRupiah) per share, as shown in the table below.

No.	Day	Date	Highest Price (Rp)	No.	Day	Date	Highest Price (Rp)
1	Tue	04-Aug-2026	444.00	46	Fri	18-Sep-2026	472.00
2	Wed	05-Aug-2026	444.00	47	Sat	19-Sep-2026	**
3	Thu	06-Aug-2026	444.00	48	Sun	20-Sep-2026	**
4	Fri	07-Aug-2026	448.00	49	Mon	21-Sep-2026	472.00
5	Sat	08-Aug-2026	**	50	Tue	22-Sep-2026	470.00
6	Sun	09-Aug-2026	**	51	Wed	23-Sep-2026	466.00
7	Mon	10-Aug-2026	448.00	52	Thu	24-Sep-2026	520.00
8	Tue	11-Aug-2026	448.00	53	Fri	25-Sep-2026	515.00
9	Wed	12-Aug-2026	448.00	54	Sat	26-Sep-2026	**
10	Thu	13-Aug-2026	446.00	55	Sun	27-Sep-2026	**
11	Fri	14-Aug-2026	468.00	56	Mon	28-Sep-2026	490.00
12	Sat	15-Aug-2026	**	57	Tue	29-Sep-2026	484.00
13	Sun	16-Aug-2026	**	58	Wed	30-Sep-2026	480.00
14	Mon	17-Aug-2026	**	59	Thu	01-Oct-2026	480.00
15	Tue	18-Aug-2026	466.00	60	Fri	02-Oct-2026	472.00
16	Wed	19-Aug-2026	464.00	61	Sat	03-Oct-2026	**
17	Thu	20-Aug-2026	470.00	62	Sun	04-Oct-2026	**
18	Fri	21-Aug-2026	478.00	63	Mon	05-Oct-2026	474.00
19	Sat	22-Aug-2026	**	64	Tue	06-Oct-2026	480.00
20	Sun	23-Aug-2026	**	65	Wed	07-Oct-2026	476.00
21	Mon	24-Aug-2026	470.00	66	Thu	08-Oct-2026	482.00
22	Tue	25-Aug-2026	**	67	Fri	09-Oct-2026	482.00
23	Wed	26-Aug-2026	468.00	68	Sat	10-Oct-2026	**
24	Thu	27-Aug-2026	474.00	69	Sun	11-Oct-2026	**
25	Fri	28-Aug-2026	472.00	70	Mon	12-Oct-2026	482.00
26	Sat	29-Aug-2026	**	71	Tue	13-Oct-2026	474.00
27	Sun	30-Aug-2026	**	72	Wed	14-Oct-2026	474.00
28	Mon	31-Aug-2026	474.00	73	Thu	15-Oct-2026	520.00
29	Tue	01-Sep-2026	484.00	74	Fri	16-Oct-2026	*
30	Wed	02-Sep-2026	492.00	75	Sat	17-Oct-2026	**
31	Thu	03-Sep-2026	490.00	76	Sun	18-Oct-2026	**
32	Fri	04-Sep-2026	488.00	77	Mon	19-Oct-2026	*
33	Sat	05-Sep-2026	**	78	Tue	20-Oct-2026	*
34	Sun	06-Sep-2026	**	79	Wed	21-Oct-2026	*
35	Mon	07-Sep-2026	486.00	80	Thu	22-Oct-2026	*
36	Tue	08-Sep-2026	484.00	81	Fri	23-Oct-2026	*
37	Wed	09-Sep-2026	478.00	82	Sat	24-Oct-2026	**
38	Thu	10-Sep-2026	476.00	83	Sun	25-Oct-2026	**
39	Fri	11-Sep-2026	472.00	84	Mon	26-Oct-2026	*
40	Sat	12-Sep-2026	**	85	Tue	27-Oct-2026	*
41	Sun	13-Sep-2026	**	86	Wed	28-Oct-2026	*
42	Mon	14-Sep-2026	472.00	87	Thu	29-Oct-2026	*
43	Tue	15-Sep-2026	476.00	88	Fri	30-Oct-2026	*
44	Wed	16-Sep-2026	482.00	89	Sat	31-Oct-2026	**
45	Thu	17-Sep-2026	474.00	90	Sun	01-Nov-2026	**

Note: The data above were obtained from PT Bursa Efek Indonesia

* Stock Suspension

**National holiday or collective leave day

In summary, the premium offered compared to the minimum price required under POJK No. 45/2024 and historical trading prices can be seen in the table below:

No.	Description	Reference Price (IDR)	Buyback Price (IDR)	Premium Offered (%)
1	Par value per share	50	1,050	2,000%
2	Average of the highest daily trading prices on the IDX over the last 90 days prior to the EGMS announcement	474.37	1,050	121.34%
3	Closing price of the Company's shares prior to the EGMS announcement	510	1,050	105.88%
4	Average of the daily closing prices of the Company's shares over the last 90 days prior to the EGMS announcement	468.27	1,050	124.22%
5	Average of the daily closing prices over the last 1 year prior to the EGMS announcement	482.37	1,050	117.68%
6	Average of the highest daily prices over the last 1 year prior to the EGMS announcement	489.98	1,050	114.29%

D. Limitation of the Share Buyback Period

As required by Article 33 paragraph (2) of POJK 45/2024, the Company will complete the Public Share Buyback within a maximum of 12 (twelve) months after the date this Information Disclosure is first announced, that is, up to 2 November 2027.

The Public Share Buyback will be carried out in several periods, provided that the Company will cease the Share Buyback offer after the end of a period in which the number of shareholders is reduced to fewer than 50 (fifty) parties, or after the end of a period in which the number of shareholders is still more than 50 (fifty) parties but the Company believes that no Public Shareholders will sell their shares any longer, the latter being subject to obtaining the approval of the OJK.

The implementation of the Public Share Buyback will be divided into 4 (four) periods, with the implementation and payment schedule for each period as follows:

Share Buyback Period – I	10 December 2026 – 3 February 2027
Payment Date, Period I	15 February 2027
Share Buyback Period – II	4 February – 4 May 2027
Payment Date, Period II	14 May 2027
Share Buyback Period – III	5 May – 5 August 2027
Payment Date, Period III	16 August 2027
Share Buyback Period – IV	6 August – 21 October 2027
Payment Date, Period IV	2 November 2027

The Company will periodically issue information disclosures to the public regarding the schedule and payment dates before the commencement of each subsequent Share Buyback period, namely before Period II, Period III, and Period IV.

If there is any change to the schedule, terms, or other material matters relating to the implementation of the Share Buyback, including if the Company ceases the Share Buyback offer, the Company will promptly announce such change to the public and submit it to the OJK in accordance with POJK 45/2024.

E. Share Buyback Method and Procedures for Submitting Participation in the Share Buyback

1. Shareholders Entitled to Participate in the Share Buyback

Shareholders entitled to participate in the Share Buyback ("**Applicants**") are all Public Shareholders who currently hold/own 155,658,180 (one hundred fifty-five million six hundred fifty-eight thousand one hundred eighty) shares and who have completed and submitted all documents required for the Share Buyback and have not submitted a cancellation of the application they have submitted before the end of the Share Buyback Period.

Applicants must be registered in the Company's Register of Shareholders and have opened a Securities Account under Collective Custody at KSEI no later than 6 (six) Business Days before the end of the Share Buyback Period, that is, no later than 13 October 2027.

If there are Public Shareholders whose shares are still in certificated (scrip) form and who plan to participate in the Share Buyback, such Public Shareholders must:

a. ensure that the collective share certificate is registered in their name in the Company's Register of Shareholders;
b. have opened a securities account with a securities company/custodian bank that holds an account at KSEI;
c. ensure that the Public Shares are deposited into the securities account by converting the collective share certificate into scripless form;
d. ensure that the conversion of the collective share certificate is made through the securities company/custodian bank at which the relevant Public Shareholder has opened a securities account; and
e. be responsible for paying the costs of converting the Public Shares into scripless form.

Shareholders of the Company whose Shares are still in certificated (scrip) form and who do not yet have a securities sub-account can obtain information on conversion of shares into scripless form by contacting the Company or the Company's BAE below:

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5, Kp. Rawa Pasung, Kota Baru, Bekasi City, 17133 Telephone: (62-21) 884 0040 Email: corporate@champion.co.id Attn: - Elbert Lo (+62) 877 8002 8575 - Hendra M (+62) 852 8782 6100	**PT ADIMITRA JASA KORPORA** Kirana Boutique Office Block F3/5 Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading, North Jakarta 14240 Telephone: (+62) 21 29745222 Email: ipo.saham@adimitra-jk.co.id

2. Procedures for Submitting the Share Buyback Application Form (FPKS)

a. Share Buyback Application Form

Public Shareholders who wish to participate in the Share Buyback are required to complete the Share Buyback Form (FPKS). The FPKS, together with the relevant supporting documents and instructions for the implementation of the Share Buyback, will only be issued and/or made available by the Company after obtaining approval from the Independent Shareholders at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) for the proposed Go Private and Delisting, including the implementation of the Share Buyback of Public Shares. Upon obtaining such approval, the FPKS and related documents will be made available on the Company's website (https://champion.co.id/) under the "Investor" section and/or distributed to Public Shareholders through electronic communication channels.

.

b. Procedures for Submitting the FPKS

The FPKS must be duly completed and signed by the Applicant or their authorized representative, and subsequently submitted together with the relevant supporting documents in electronic form (softcopy), including scanned copies of the signed documents, via email to their respective securities company and/or custodian bank, accompanied by the following:

i. Individual Shareholders
   - a photocopy of the Shareholder's valid Identity Card (KTP);
   - a photocopy of the passport/limited stay permit card for Shareholders who are foreign nationals.

ii. Shareholders that are legal entities
   - a photocopy of the articles of association and the deed stating the latest composition of the Board of Directors and Board of Commissioners;
   - a photocopy of the valid Identity Card (KTP) (or passport, if a foreign national) of the Director(s) entitled to represent the institutional Shareholder.

In the event that the FPKS is signed by the Applicant's authorized representative, a duly signed power of attorney in a format acceptable to the Share Registrar (BAE) must be submitted in electronic form (softcopy), together with the FPKS and other supporting documents. For the purpose of submitting an application to participate in the Share Buyback, the submission of original documents in physical form (hardcopy) is not required, subject to the verification requirements agreed upon with the BAE and the Appointed Securities Company.

The power of attorney form for participation in the Share Buyback will be made available after obtaining approval at the EGMS, together with the FPKS, through the Company's website or by contacting the Company or the Share Registrar (BAE) using the contact details provided above.

c. Verification and Proof of Receipt

The FPKS may be submitted to the Share Registrar (BAE), or to the securities company or custodian bank with which the Applicant's Public Shares are held. Upon submission of the duly completed FPKS and other required documents to the BAE through email address ipo.saham@adimitra-jk.co.id, the Applicant will receive an acknowledgment of participation in the Share Buyback, duly dated, signed, and stamped by the BAE.

The duly completed and signed FPKS, together with all supporting documents, may be submitted by the Applicant to the Share Registrar (BAE), the securities company and/or the custodian bank with which the Applicant's Public Shares are held, via email in electronic form (softcopy), as described above. The securities company and the BAE will verify the completeness of the submitted documents and provide an acknowledgment of receipt or confirmation of participation electronically via email. Submission of the FPKS does not relieve the Applicant of the obligation to submit participation instructions through the securities company or custodian bank with which the Applicant's Public Shares are held.

Subsequently, the Applicant must instruct the securities company or custodian bank with which the Applicant's Public Shares are held to submit the participation instruction through the Corporate Action (CA) menu in KSEI's Central Depository and Book Entry Settlement System ("C-BEST"), by selecting the TEND event and CASH option, in accordance with the procedures and schedule prescribed by KSEI. Once the instruction has been submitted and authorized by the securities company or custodian bank, the participating shares will be assigned "Blocked for CA" status and may not be transferred or traded for as long as the instruction remains in effect.

In the event that the Applicant's securities company or custodian bank fails to submit and authorize the participation instruction under the TEND event with the CASH option in the C-BEST system by the deadline prescribed by KSEI for each Share Buyback Period, the relevant Applicant's application to participate in the Share Buyback shall be deemed cancelled and invalid.

Public Shares that have been assigned "Blocked for CA" status may not be transferred or traded for as long as the participation instruction remains in effect, unless such instruction is cancelled by the securities company or custodian bank on behalf of the Applicant in accordance with the cancellation procedures set out below.

d. Cancellation of Share Buyback Application

Prior to the expiration of each Share Buyback Period, an Applicant who has submitted an application to participate in the Share Buyback may cancel their participation in respect of all or part of their Public Shares that have been assigned "Blocked for CA" status, through the securities company or custodian bank with which such Public Shares are held, by submitting written notice via email stating the reasons for cancellation to the securities company or custodian bank, with a copy to KSEI, in accordance with the applicable deadlines and requirements prescribed by KSEI.

An Applicant who cancels their participation must instruct their securities company or custodian bank to cancel the CASH instruction under the TEND event through the C-BEST system. Once the cancellation instruction has been processed and authorized in accordance with KSEI's requirements, the status of the relevant Public Shares will change from "Blocked for CA" to "Available", allowing such Public Shares to be transferred or traded again in accordance with applicable regulations.

e. Payment

On each Payment Date, KSEI will settle the Public Shares held by Applicants that have been assigned "Blocked for CA" status and have been verified and approved for participation in the Share Buyback, by transferring such Public Shares through book-entry to the securities account in the name of the Company, in accordance with the applicable settlement procedures and requirements of KSEI.

Payment of the Share Buyback Price to approved Applicants will be made by the Appointed Securities Company, acting for and on behalf of the Company, through KSEI. KSEI will disburse the funds through the C-BEST system by means of book-entry transfers to the accounts of the respective securities companies or custodian banks of the approved Applicants, for subsequent distribution to the relevant Applicants. Payment will be made in Rupiah.

f. Transaction Costs

The Company will bear all costs relating to the Share Buyback transactions, including transaction commissions through the IDX and KSEI fees, but excluding applicable taxes imposed on the Shareholders as a result of the sale of their Shares in the Share Buyback.

Public Shareholders who sell their Shares in scripless form in the Share Buyback will be subject to a sales tax levy of 0.1% of the proceeds of the sale of the Shares, or 0.6% if the Shares sold are founders' Shares.

g. Cancellation of the Share Buyback

This Share Buyback cannot be cancelled after this Information Disclosure is announced, unless the approval of the OJK is obtained or the approval of the Independent Shareholders at the EGMS is not obtained.

h. Reporting of the Results of the Share Buyback

The Company will report the results of the share buyback to the OJK and the public periodically, no later than 5 (five) Business Days after each Payment Date.

F. Source of Funds to be Used for the Implementation of the Share Buyback

Based on the Company's cash and cash equivalents balance as of October 28, 2026, the Company has total cash funds amounting to Rp186,580,776,967.38 (one hundred eighty six billion five hundred eighty million seven hundred seventy six thousand nine hundred sixty seven point three eight Rupiah).

The Company confirms that the source of funds to be used for the Public Share Buyback is entirely the Company's internal funds, is not derived from proceeds of a public offering, and is not derived from loans and/or debt in any form, and will not significantly affect the Company's financial ability to meet its obligations as they fall due.

The Company estimates that the maximum funds required for the Share Buyback will amount to Rp163,441,089,000 (one hundred sixty-three billion four hundred forty-one million eighty-nine thousand Rupiah) to repurchase up to 155,658,180 (one hundred fifty-five million six hundred fifty-eight thousand one hundred eighty) Public Shares, representing approximately 16.78% (sixteen point seven eight percent) of the Company's total issued and fully paid-up shares, which constitute the shares subject to the Share Buyback, at a buyback price of Rp1,050 (one thousand fifty Rupiah) per share.

G. Estimated Decrease in the Company's Revenue as a Result of the Implementation of the Public Share Buyback and Its Impact on the Company's Financing Costs

The Company believes that the implementation of the Public Share Buyback will not have a material adverse effect on the Company's business activities, including any direct effect in the form of a decrease in revenue. This is because the Company has sufficient working capital and cash flow to finance the transaction alongside the Company's business activities.

To fund the Public Share Buyback, including transaction-related costs, the Company will use only the Company's internal cash, so that the Company's cash is estimated to decrease by up to Rp163,441,089,000 (one hundred sixty-three billion four hundred forty-one million eighty-nine thousand Rupiah) plus related costs.

H. Pro Forma Earnings per Share of the Company after Implementation of the Public Share Buyback, Taking into Account the Decline in Revenue

In accordance with the Consolidated Company's Financial Statements as of 31 December 2025, the Company's earnings per share is Rp64.03 (sixty-four point zero three Rupiah) and is estimated, after the implementation of the Public Share Buyback, to be as follows:

(in millions of Rupiah)

Description	31 December 2025		
	Before the Public Share Buyback	Impact △	After the Public Share Buyback

Total Assets	1,006,967	-163,441	843,526
Total Equity	892,620	-163,441	729,179
Net Income	86,487	-	86,487
Total Comprehensive Income for the Year	84,422	-	84,422
Earnings per Share of the Company	0.00006403 (Rp64.03)	+0.00001298 +(Rp12.98)	0.00007701 (Rp77.01)
Return on Assets (ROA)	8.6%	+1.7%	10.3%
Return on Equity (ROE)	9.7%	+2.2%	11.9%

Pro forma financial information presented above is intended to illustrate the financial impact of the Share Buyback to be undertaken by the Company, assuming that the Company fully utilises its internal cash resources to repurchase the maximum number of shares subject to the Share Buyback.

The pro forma adjustments reflect a reduction in the Company's total assets and total equity equivalent to the maximum amount of funds required to implement the Share Buyback. In preparing the pro forma financial information, transaction-related costs arising from the Share Buyback and any potential reduction in interest income resulting from the utilisation of the Company's cash resources have not been taken into account, on the assumption that their impact would not be material to the Company's financial position and financial performance.

Based on the explanation above, the Company believes that the implementation of the Share Buyback will not have a material adverse effect on the Company's business activities and on the direct effect on the Company's revenue.

I. Management's Analysis and Discussion of the Effect of the Share Buyback on the Company's Business Activities and Future Growth

The Company has considered the potential impact of the Share Buyback on the Company's financial condition, liquidity, operational activities, and business continuity.

The Company believes that the implementation of the Share Buyback transaction will not have a material adverse effect on the Company's business activities and revenue, considering that the Company has sufficient working capital and cash flow to fund the Public Share Buyback alongside the Company's business activities.

VI. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

A. Background

The EGMS regarding the Go Private and Delisting Plan will be held on Wednesday, 9 December 2026, at 10.00 WIB, at Mitsui House Jakarta, Jl. Diponegoro No. 42, Menteng, Jakarta Pusat.

The Company will also hold the EGMS electronically via the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) in accordance with POJK 14/2025.

In this regard, the Company strongly urges all Shareholders to attend the EGMS by granting a proxy to a party designated by the Securities Administration Bureau by signing and returning the proxy form, which can be obtained on the Company's website (https://champion.co.id/) as well as the Independent Shareholder Declaration to the Company via email at corporate@champion.co.id.

The original power of attorney must be received by the Company's Board of Directors no later than 3 (three) Business Days prior to the EGMS date, namely on Friday, 4 December 2026, at the office of

the Company's Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora, domiciled in Jakarta and located at Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta, 14240.

Shareholders may also grant a proxy electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) at https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as a mechanism for granting power of attorney electronically in the process of holding the EGMS no later than 1 (one) Business Day before the date of the EGMS, namely on Tuesday, 8 December 2026, at 16.00 WIB.

Independent Shareholders or their proxies who wish to attend the EGMS are required to sign the Independent Shareholder Statement, which is available on the Company's website.

The announcement regarding the EGMS, along with a summary of the Information Disclosure to Shareholders, was published on 2 November 2026, on the IDX website, eASY.KSEI website, and the Company's website, as well as in Indonesian-language newspapers, namely Link Bisnis.

The notice to attend the EGMS will be announced on the IDX website, the eASY.KSEI website, and the Company's website on 17 November 2026.

Shareholders entitled to attend the EGMS are those whose names are listed in the Company's Register of Shareholders as of the Recording Date.

B. EGMS Agenda

The agendas of the EGMS are as follows:

1. **First Agenda**: Approval of the Go Private and Delisting Plan, which includes:
    a. approval of the delisting of the Company's shares from the IDX;
    b. approval of the change in the Company's status from a public company to a private company;
    c. approval of the Share Buyback as part of the implementation of the Go Private and Delisting Plan; and
    d. authorization of the Company's Board of Directors to take all necessary actions in implementing the Go Private and Delisting Plan, including the execution of the Share Buyback.
2. **Second Agenda**: Subject to approval of the first agenda above, approval of amendments to the Company's entire Articles of Association in connection with the change in the Company's status from a public company to a private company, and authorization of the Company's Board of Directors to take all necessary actions to implement the amendments to the Company's Articles of Association.

First Agenda requires the approval of the Independent Shareholders. Meanwhile, the Second Agenda does NOT require the approval of the Independent Shareholders.

C. Requirements Under Applicable Laws and Regulations for the EGMS

Pursuant to (i) POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020 and (ii) the Articles of Association, the procedure for approving resolutions on agenda items to be considered at the EGMS is as follows:

1. First Agenda: Approval of the Go Private and Delisting Plan

The requirements that must be met are in accordance with the Company's Articles of Association *juncto* POJK 45/2024 and POJK 15/2020. The EGMS must be attended by

Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of Shares with valid voting rights held by Independent Shareholders.

Resolutions shall be adopted based on the affirmative votes of Independent Shareholders representing more than one-half (1/2) of the total number of Shares with valid voting rights held by the Independent Shareholders.

2. Second Agenda: Amendment of the Company's Articles of Association

The requirements that must be met are in accordance with the Company's Articles of Association *juncto* POJK 15/2020, which requires the presence of Shareholders representing at least 2/3 (two-thirds) of the total number of Shares with valid voting rights issued by the Company and/or their duly authorized proxies, and a resolution is valid if approved by Shareholders representing more than 2/3 (two-thirds) of the total Shares with valid voting rights present or duly represented at the EGMS.

Quorum Requirements

If the required attendance quorum for passing resolutions on each agenda at the EGMS is not reached, the Company may hold a second and third EGMS, subject to the following attendance quorum and voting approval requirements as outlined in POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association, as follows:

(i) Second EGMS

In the event that the attendance quorum for the first EGMS is not met, the second EGMS may be held subject to the following requirements:

3. First Agenda: Approval of the Go Private and Delisting Plan

The second EGMS may be held provided that it is attended by Independent Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total number of Shares with valid voting rights held by Independent Shareholders.

Resolutions of the second EGMS shall be adopted based on the affirmative votes of Independent Shareholders representing more than one-half (1/2) of the total number of Shares with valid voting rights held by the Independent Shareholders present at the second EGMS.

4. Second Agenda: Amendment of the Company's Articles of Association

The second EGMS may be convened provided that it is attended by Shareholders representing at least 3/5 (three-fifths) of the total issued shares of the Company with valid voting rights, and/or their duly authorized proxies.

Resolutions of the second EGMS shall be valid if approved by Shareholders representing more than 1/2 (one-half) of the total Shares with valid voting rights held by Shareholders present at the second EGMS.

(ii) Third EGMS

In the event that the attendance quorum for the second EGMS is not met, the Third EGMS may be held subject to the following requirements:

5. **First Agenda: Approval of the Go Private and Delisting Plan**

   The third EGMS may be held, provided that the Third EGMS is valid and has the authority to adopt resolutions if it is attended by Independent Shareholders holding valid voting Shares, in accordance with the attendance quorum determined by OJK upon the Company's request.

   Resolutions of the third EGMS are valid if approved by Independent Shareholders representing more than 50% (fifty percent) of the Shares held by Independent Shareholders present at the third EGMS.

6. **Second Agenda: Amendment of the Company's Articles of Association**

   The third EGMS may be held, provided that the third EGMS is valid and has the authority to adopt resolutions if it is attended by Shareholders holding valid voting Shares in accordance with the attendance quorum and voting quorum determined by OJK upon the Company's request.

VII. OBLIGATIONS FOR APPROVAL AND/OR LEGAL MATTERS

The Company does not require prior approval and/or permission from any particular government agency or other third party in connection with the Go Private and Delisting Plan. There is no obligation to obtain approval from, or give notice to, third parties in connection with the planned change of the Company's status, other than to the public.

At present, there are no legal matters, whether material or immaterial, and/or claims from third parties currently involving the Company or the Directors and Commissioners of the Company.

VIII. ESTIMATED KEY DATES IN CONNECTION WITH THE GO PRIVATE AND DELISTING PLAN

The estimated key dates in connection with the Go Private and Delisting Plan are as follows:

No.	Activity	Date
1.	Notification of the EGMS Agenda to the OJK	26 October 2026
2.	Announcement of the EGMS and Information Disclosure on the Go Private and Delisting Plan	2 November 2026
3.	Date of the Register of Shareholders entitled to attend / Recording Date	16 November 2026
4.	Invitation of the EGMS	17 November 2026
5.	Conduct of the EGMS	9 December 2026
6.	Completion of the Public Share Buyback (as described in Chapter V Section D above) no later than	2 November 2027
7.	Estimated approval of the MOL for the amendment of the Company's articles of association	15 November 2027
8.	Estimated application to the OJK for revocation of the effectiveness of the Registration Statement for the Public Offering of Equity Securities or the Public Company Registration Statement	16 November 2027
9.	Estimated revocation by the OJK of the effectiveness of the Registration Statement for the Public Offering of Equity Securities and/or the Public Company Registration Statement	30 November 2027
10.	Estimated cancellation of the listing of the Company's Securities by the IDX	14 December 2027
11.	Estimated cancellation of the collective custody of the Company's Securities by KSEI	14 December 2027

IX. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Directors and the Board of Commissioners hereby declare that all material information has been disclosed and is not misleading.

X. OTHER INFORMATION

Shareholders who require further information on the Go Private and Delisting Plan may contact the Company during operating hours through the following contacts:

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK
Jalan Raya Sultan Agung Km. 28.5, Kp. Rawa Pasung,
Kota Baru, Bekasi City, 17133
Telephone: (62-21) 884 0040
Operating Hours: Monday to Friday, 08.00 – 17.00 WIB
Website: https://champion.co.id/
Email: corporate@champion.co.id
Contact Information
Elbert Lo (+62) 877 8002 8575 **Hendra M** (+62) 852 8782 6100

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Block F3/5
Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
North Jakarta 14240
Telephone: (+62) 21 29745222
Operating Hours: Monday to Friday, 08.00 – 17.00 WIB
Email: ipo.saham@adimitra-jk.co.id

Pajak Ekonomi Digital Capai Rp58,75 T

"DJP terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis pemungutan pajak agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan perpajakan," kata Bimo Wijayanto.

JAKARTA (LB) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital hingga 30 September 2026 capai Rp58,75 triliun. Angak ini mencerminkan kontribusi aktivitas ekonomi digital terhadap penerimaan negara.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan capaian ini utamanya berasal dari empat sektor yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), aset kripto, teknologi finansial (fintech), serta pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Secara berurutan, sektor PMSE menjadi kontributor terbesar penerimaan pajak sektor ekonomi digital dengan nilai capai Rp45,21 triliun, diikuti oleh Pajak SIPP sebesar Rp5,96 triliun, pajak atas transaksi fintech sebesar Rp5,40 triliun, serta pajak atas transaksi aset kripto sebesar Rp2,18 triliun.

"DJP terus memperkuat pengawasan dan memperluas basis pemungutan pajak agar pertumbuhan ekonomi digital berjalan seiring dengan peningkatan kepatuhan perpajakan," kata Bimo dalam keterangan resmi, Sabtu (31/10).

Secara rinci ia menjelaskan, hingga akhir September 2026 pihaknya telah menunjuk 280 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari total pelaku usaha yang telah ditunjuk tersebut, sebanyak 245 pelaku usaha PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dengan total Rp45,21 triliun hingga 30 September 2026.

Bimo menyatakan penerimaan PPN PMSE terus terkumpul sejak 2020. Setoran tercatat sebesar Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, dan Rp9,54 triliun sepanjang Januari-September 2026.

Kemudian untuk penerimaan pajak dari transaksi aset kripto yang mencapai Rp2,18 triliun, ia menjelaskan jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar Rp1,30 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp881,82 miliar.

Penerimaan pajak kripto juga terus terakumulasi setiap tahun, berasal dari setoran sebesar Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, Rp796,74 miliar pada 2025, serta Rp300,28 miliar pada Januari-September 2026.

Setelahnya dari sektor teknologi finansial atau fintech, penerimaan pajak mencapai Rp5,40 triliun hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar Rp1,51 triliun, PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman yang diterima wajib pajak luar negeri sebesar Rp728,20 miliar dan PPN dalam negeri sebesar Rp3,16 triliun.

Dalam hal ini setoran pajak fintech tercatat sebesar Rp446,39 miliar pada 2022, Rp1,11 triliun pada 2023, Rp1,48 triliun pada 2024, Rp1,37 triliun pada 2025 dan Rp989,53 miliar sepanjang Januari-September 2026.

Terakhir, penerimaan dari Pajak SIPP yang mencapai Rp5,96 triliun hingga akhir September 2026 ini berasal dari PPh Pasal 22 sebesar Rp432,69 miliar dan PPN sebesar Rp5,53 triliun.●**dot**

Indika Energy Raih Laba US$20,2 Juta

JAKARTA (LB) - PT Indika Energy Tbk meraih laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$20,2 juta hingga kuartal III 2026, meningkat dari US$0,5 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun pendapatan tercatat sebesar US$1.842,3 juta per akhir September 2026 atau naik 27,7 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar US$1.443,0 juta.

"Kinerja perseroan hingga kuartal III 2026 menunjukkan penguatan operasional, tercermin dari pertumbuhan pendapatan, laba kotor, dan adjusted EBITDA," kata Direktur Utama dan Group CEO Indika Energy Azis Armand, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (1/11).

Azis menyampaikan bahwa capaian ini menjadi pijakan untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru, dengan hampir seluruh belanja modal diarahkan ke bisnis nonbatu bara, terutama proyek Awak Mas.

Bersamaan dengan itu, ujar dia, perseroan terus menjaga kinerja bisnis yang selama ini menjadi penopang untuk mendukung transformasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Lebih lanjut, perseroan mencatat bahwa pertumbuhan pendapatan terutama didorong oleh peningkatan kontribusi Kideco Jaya Agung (Kideco), Tripatra, Interport Mandiri Utama (Interport), dan Indika Indonesia Resources (IIR).

Pendapatan Kideco meningkat 16,8 persen menjadi US$1.345,6 juta, didukung kenaikan harga jual rata-rata sebesar 14,0 persen menjadi US$56,3 per ton serta peningkatan volume penjualan sebesar 496 ribu ton atau 2,2 persen menjadi 22,6 juta ton.●**dro**

TRIPATRA Dukung KPI Wujudkan Pabrik Pencairan CO2 Berkapasitas 300 Metrik Ton Per Hari

JAKARTA (LB) - PT Tripatra Engineers and Constructors (TRIPATRA), perusahaan penyedia solusi berbasis rekayasa teknik, mendukung PT Kaltim Parna Industri (KPI), unit usaha petrokimia Parna Raya Group, dalam pembangunan fasilitas pencairan karbon dioksida (CO2) di Bontang, Kalimantan Timur.

Fasilitas yang diresmikan pada 22 Oktober 2026 ini memiliki kapasitas desain sebesar 300 metrik ton per hari, dengan TRIPATRA menjalankan lingkup pekerjaan engineering, procurement, and construction (EPC).

Fasilitas ini memanfaatkan CO2 hasil samping produksi amonia KPI untuk diolah menjadi karbon dioksida cair atau liquid CO2 (LCO2) bernilai komersial.

Melalui pemurnian dan pencairan, fasilitas tersebut dirancang untuk menghasilkan CO2 yang memenuhi persyaratan penggunaan industri dan pangan, termasuk untuk kebutuhan industri makanan dan minuman.

President Director & CEO TRIPATRA Raymond Naldi Rasfuldi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh KPI untuk membangun fasilitas pabrik pencairan CO2 ini.

"Kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab sekaligus kebanggaan bagi kami untuk turut mendukung pengembangan usaha KPI. Tripatra sebagai kontraktor penyedia solusi berbasis rekayasa teknik, mendukung KPI untuk mewujudkan fasilitas pabrik pencairan CO2 terbesar di Indonesia, serta menjadi yang pertama di Pulau Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur. Pencapaian ini merupakan hasil kerja bersama, ketekunan, dan komitmen seluruh tim KPI, Tripatra, serta para mitra yang terlibat," President Director & CEO TRIPATRA Raymond Naldi Rasfuldi, dalam siaran pers tertulis, Minggu (1/11/2026).

Pemanfaatan CO2 pada fasilitas ini merupakan penerapan Carbon Capture and Utilization (CCU), yaitu penangkapan dan pemanfaatan kembali karbon dioksida untuk berbagai kebutuhan industri.

Melalui pendekatan ini, CO2 hasil samping produksi amonia KPI diolah menjadi produk bernilai komersial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan industri dan pangan. Untuk mendukung proses pengolahan tersebut, fasilitas ini dirancang dengan konsumsi energi listrik maksimum sebesar 188 kilowatt-jam per ton produk.

TRIPATRA melanjutkan dukungannya kepada KPI melalui tahap pengujian kinerja dan keandalan fasilitas untuk memastikan pemenuhan target yang telah ditetapkan. Tahap ini menjadi bagian penting dalam mempersiapkan fasilitas agar dapat mendukung kebutuhan operasional KPI secara andal.

"Dalam setiap tahapnya, keselamatan, kualitas, dan kerja sama yang erat dengan KPI tetap menjadi prioritas kami. Melalui kolaborasi ini, KPI dan TRIPATRA juga berkomitmen untuk mendorong inovasi berkelanjutan yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan perekonomian nasional," ujar Raymond Naldi Rasfuldi.



▲ Peresmian fasilitas pencairan karbon dioksida (CO2) di Bontang, Kalimantan Timur.

Kolaborasi ini menunjukkan peran keahlian rekayasa dalam mendukung pengembangan usaha melalui pemanfaatan produk samping industri. Bagi KPI, kehadiran fasilitas tersebut membuka peluang untuk memperluas portofolio produk sekaligus meningkatkan nilai tambah dari proses produksi amonia yang telah berjalan.

Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, TRIPATRA terus mengembangkan solusi berbasis rekayasa teknik untuk menjawab kebutuhan industri. Melalui perpaduan keahlian multidisiplin dan kemampuan pelaksanaan proyek, TRIPATRA berkomitmen mendukung para mitranya dalam mewujudkan fasilitas yang mengutamakan keselamatan, kualitas, dan keandalan.

"TRIPATRA merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan KPI dan meyakini bahwa kolaborasi ini akan membuka peluang baru dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa hadirnya fasilitas ini dapat menjadi tonggak penting dalam transformasi industri, khususnya pemanfaatan produk sampingan (byproduct) industri menjadi materi berdaya guna," tutup Raymond. ●**Kris**

Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi terkait jadwal dan tanggal pembayaran secara berkala kepada masyarakat sebelum dimulainya setiap periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham berikutnya, yaitu sebelum Periode II, Periode III, dan Periode IV.

Apabila terdapat perubahan atas jadwal, ketentuan, atau hal material lainnya terkait pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, termasuk apabila Perseroan menghentikan penawaran Pembelian Kembali Saham, Perseroan akan segera mengumumkan perubahan tersebut kepada masyarakat dan menyampaikannya kepada OJK sesuai dengan POJK 45/2024.

E. Metode Pembelian Kembali Saham dan Tata Cara Pengajuan Partisipasi Dalam Pembelian Kembali Saham

1. Pemegang Saham Yang Berhak untuk Berpartisipasi Dalam Pembelian Kembali Saham

Pemegang Saham yang berhak untuk berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham ("**Pemohon**") adalah seluruh Pemegang Saham Publik, yang saat ini memegang/memiliki 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham serta yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Pembelian Kembali Saham dan tidak mengajukan pembatalan atas permohonan yang telah disampaikannya sebelum Periode Pembelian Kembali Saham berakhir.

Pemohon harus terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan telah membuka Rekening Efek pada Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum berakhirnya Periode Pembelian Kembali Saham, yaitu selambat-lambatnya tanggal 13 Oktober 2027.

Dalam hal terdapat Pemegang Saham Publik yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (scrip) dan berencana untuk berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham, Pemegang Saham Publik wajib:

a. memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
b. telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
c. memastikan bahwa Saham Publik dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless*;
d. memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana Pemegang Saham Publik yang bersangkutan telah membuka rekening efek; dan
e. bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi Saham Publik menjadi bentuk *scripless*.

Para Pemegang Saham Perseroan yang Saham miliknya masih dalam bentuk warkat (*scrip*) dan belum memiliki sub-rekening efek dapat memperoleh informasi mengenai konversi saham menjadi tanpa warkat dengan menghubungi kontak Perseroan atau BAE Perseroan di bawah ini:

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK
Jl. Raya Sultan Agung Km.28.5,
Kp. Rawa Pasung,
Kota Baru, Kota Bekasi, 17133
Telepon: (62-21) 884 0040
Email: corporate@champion.co.id
U.p : - **Elbert Lo** (+62) 877 8002 8575
- **Hendra** (+62) 852 8782 6100

PT ADIMITRA JASA KORPORA
Kirana Boutique Office Blok F3/5
Jalan Kirana Avenue III, Kelapa Gading,
Jakarta Utara 14240
Telepon: (+62) 21 29745222
Email: ipo.saham@adimitra-jk.co.id

2. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Formulir Pembelian Kembali Saham (FPKS)

a. Formulir Pembelian Kembali Saham

Pemegang Saham Publik yang berminat berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham wajib mengisi FPKS. FPKS beserta dokumen dan petunjuk pendukung pelaksanaan Pembelian Kembali Saham baru akan diterbitkan dan/atau disediakan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*, termasuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik. Setelah persetujuan diperoleh, FPKS dan dokumen terkait akan tersedia pada situs web Perseroan (https://champion.co.id/) pada tautan "Investor" dan/atau disampaikan kepada Pemegang Saham Publik melalui sarana komunikasi elektronik.

b. Tata Cara Pengajuan FPKS

FPKS wajib diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan beserta dokumen pendukung yang relevan dalam bentuk salinan elektronik (softcopy), termasuk hasil pemindaian (scan) dokumen yang telah ditandatangani, melalui email kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian masing-masing, dengan melampirkan:

i. Pemegang Saham individu
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku;
- fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham berkewarganegaraan asing.

ii. Pemegang Saham berbadan hukum
- fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.

Dalam hal FPKS ditandatangani oleh kuasa Pemohon, surat kuasa yang telah ditandatangani dalam format yang dapat diterima oleh BAE wajib dilampirkan dalam bentuk salinan elektronik (softcopy) bersama FPKS dan dokumen pendukung lainnya. Untuk keperluan pengajuan partisipasi dalam Pembelian Kembali Saham, dokumen asli dalam bentuk fisik tidak diwajibkan untuk diserahkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan verifikasi yang disepakati dengan BAE dan Perusahaan Efek Yang Ditunjuk.

Format surat kuasa untuk keperluan partisipasi dalam Pembelian Kembali Saham akan disediakan setelah persetujuan RUPSLB diperoleh, bersamaan dengan FPKS, melalui situs web Perseroan atau melalui kontak Perseroan atau BAE sebagaimana disebutkan di atas.

c. Verifikasi dan Bukti Penerimaan

FPKS dapat diserahkan kepada BAE atau perusahaan sekuritas atau bank kustodian di mana Saham Publik milik Pemohon disimpan. Setelah menyerahkan FPKS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE melalui alamat email ipo.saham@adimitra-jk.co.id, Pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Pembelian Kembali Saham yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE.

FPKS yang telah diisi dan ditandatangani beserta seluruh dokumen pendukung dapat disampaikan oleh Pemohon kepada BAE, perusahaan sekuritas dan/atau bank kustodian dimana Saham Publik milik Pemohon disimpan melalui email dalam bentuk softcopy sebagaimana diuraikan di atas. Perusahaan Sekuritas dan BAE akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen dan memberikan konfirmasi penerimaan atau tanda terima keikutsertaan dalam bentuk elektronik melalui email. Penyampaian FPKS tidak menggantikan kewajiban Pemohon untuk menyampaikan instruksi partisipasi melalui perusahaan efek/bank kustodian tempat Saham Publik milik Pemohon disimpan.

Selanjutnya, Pemohon harus menginstruksikan perusahaan efek/bank kustodian tempat Saham Publik miliknya disimpan untuk memasukkan instruksi partisipasi melalui menu Corporate Action (CA) di sistem *Central Depository and Book Entry Settlement System* ("**C-BEST**") KSEI dengan memilih event TEND dan opsi CASH, sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan KSEI. Setelah instruksi dimasukkan dan diotorisasi oleh perusahaan efek/bank kustodian, saham yang diikutsertakan akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan selama instruksi tersebut masih berlaku.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum memasukkan dan mengotorisasi instruksi partisipasi pada event TEND dengan opsi CASH dalam sistem C-BEST sesuai batas waktu yang ditetapkan KSEI pada setiap Periode Pembelian Kembali Saham, permohonan partisipasi Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Publik yang telah berstatus "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan selama instruksi partisipasi masih berlaku, kecuali instruksi partisipasi tersebut dibatalkan oleh perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon sesuai dengan ketentuan pembatalan di bawah ini.

d. Pembatalan Permohonan Pembelian Kembali Saham

Sebelum berakhirnya setiap Periode Pembelian Kembali Saham, Pemohon yang telah mengajukan permohonan partisipasi dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Pembelian Kembali Saham untuk seluruh atau sebagian Saham Publik miliknya yang telah berstatus "Blocked for CA" melalui perusahaan efek/bank kustodian tempat Saham Publik tersebut disimpan, dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis melalui email beserta alasan pembatalan kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan kepada KSEI, sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya wajib menginstruksikan perusahaan efek/bank kustodian untuk membatalkan instruksi CASH pada event TEND melalui sistem C-BEST. Setelah instruksi pembatalan diproses dan diotorisasi sesuai dengan ketentuan KSEI, status Saham Publik yang dibatalkan akan berubah dari "Blocked for CA" menjadi "Available", sehingga Saham Publik tersebut dapat kembali dialihkan atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Pembayaran

Pada setiap Tanggal Pembayaran, KSEI akan melakukan penyelesaian atas Saham Publik milik Pemohon yang telah berstatus "Blocked for CA" dan telah diverifikasi serta disetujui untuk mengikuti Pembelian Kembali Saham, dengan melakukan pemindahbukuan Saham Publik tersebut ke rekening efek atas nama Perseroan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku di KSEI.

Pembayaran Harga Pembelian Kembali Saham kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui sistem C-BEST dengan melakukan pemindahbukuan dana ke rekening perusahaan efek/bank kustodian masing-masing Pemohon yang disetujui untuk selanjutnya diteruskan kepada Pemohon yang bersangkutan. Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

f. Biaya Transaksi

Perseroan akan menanggung seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi Pembelian Kembali Saham, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Pembelian Kembali Saham.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Pembelian Kembali Saham akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,1% dari hasil penjualan Saham, atau 0,6% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

g. Pembatalan Pembelian Kembali Saham

Pembelian Kembali Saham ini tidak dapat dibatalkan setelah Keterbukaan Informasi ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK atau tidak diperolehnya persetujuan Pemegang Saham Independen pada RUPSLB.

h. Pelaporan Hasil Pembelian Kembali Saham

Perseroan akan melaporkan hasil pembelian kembali saham kepada OJK dan publik secara berkala paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah setiap tanggal pembayaran.

F. Sumber Dana yang akan Digunakan Untuk Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham

Berdasarkan saldo kas dan setara kas Perseroan per tanggal 28 Oktober 2026, Perseroan memiliki total dana kas sebesar Rp186.580.776.967,38 (seratus delapan puluh enam miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh tujuh koma tiga delapan Rupiah).

Perseroan memastikan bahwa sumber dana yang akan digunakan untuk Pembelian Kembali Saham Publik seluruhnya merupakan dana internal Perseroan, bukan merupakan dana hasil penawaran umum dan bukan merupakan dana yang berasal dari pinjaman dan/atau hutang dalam bentuk apapun, serta tidak mempengaruhi secara signifikan kemampuan keuangan Perseroan dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.

Perseroan memperkirakan kebutuhan dana maksimum sebesar Rp163.441.089.000 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah) untuk membeli kembali Saham Publik yakni sebanyak 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili sekitar 16,78% (enam belas koma tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang menjadi obyek Pembelian Kembali Saham dengan harga pembelian kembali saham Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) per saham.

G. Perkiraan Penurunan Pendapatan Perseroan Akibat Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik dan Dampaknya Terhadap Biaya Pembiayaan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk dampak langsung terhadap penurunan pendapatan. Hal ini disebabkan Perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup untuk membiayai transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Untuk keperluan pendanaan Pembelian Kembali Saham Publik termasuk biaya-biaya terkait dengan transaksi, Perseroan akan sepenuhnya menggunakan kas internal Perseroan, sehingga kas Perseroan diperkirakan berkurang sebanyak-banyaknya sebesar Rp163.441.089.000 (seratus enam puluh tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah biaya-biaya terkait.

H. Proforma Laba per Saham Perseroan Setelah Dilaksanakan Pembelian Kembali Saham Publik, Dengan Mempertimbangkan Menurunnya Pendapatan

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2025, laba per saham Perseroan adalah sebesar Rp64,03 (enam puluh empat koma nol tiga Rupiah) dan diperkirakan setelah dilaksanakannya Pembelian Kembali Saham Publik adalah sebagai berikut:

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025		
	Sebelum Pembelian Kembali Saham Publik	Dampak Δ	Setelah Pembelian Kembali Saham Publik
Total Aset	1.006.967	-163.441	843.526
Total Ekuitas	892.620	-163.441	729.179
Laba Tahun Berjalan	86.487	-	86.487
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	84.422	-	84.422
Laba Per Saham Perseroan	0,00006403 (Rp64,03)	+0,00001298 +(Rp12,98)	0,00007701 (Rp77,01)
Pengembalian atas Aset (ROA)	8,6%	+1,7%	10,3%
Pengembalian atas Ekuitas (ROE)	9,7%	+2,2%	11,9%

Informasi Proforma Keuangan di atas ditampilkan sebagai gambaran terkait dampak pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan secara penuh dana kas internal Perseroan hingga jumlah maksimum saham yang menjadi objek Pembelian Kembali Saham.

Penyesuaian proforma mencerminkan pengurangan total aset dan total ekuitas Perseroan sebesar nilai maksimum dana yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham. Dalam penyusunan informasi keuangan proforma tersebut, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham serta potensi berkurangnya pendapatan bunga akibat penggunaan dana kas Perseroan tidak diperhitungkan, dengan asumsi bahwa dampaknya tidak material terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan Perseroan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan dampak langsung terhadap pendapatan Perseroan.

I. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Pengaruh Pembelian Kembali Saham Terhadap Kegiatan Usaha dan Pertumbuhan Perseroan di Masa Mendatang

Perseroan telah mempertimbangkan potensi dampak Pembelian Kembali Saham terhadap kondisi keuangan, likuiditas, kegiatan operasional, dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, mengingat Perseroan mempunyai modal kerja dan arus kas yang cukup untuk mendanai Pembelian Kembali Saham Publik bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

A. Latar Belakang

RUPSLB mengenai Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2026 pada pukul 10.00 WIB, yang akan dilaksanakan di Mitsui House Jakarta, Jl. Diponegoro No. 42, Menteng, Jakarta Pusat .

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) berdasarkan POJK 14/2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sangat menghimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek dengan menandatangani serta mengembalikan formulir surat kuasa yang dapat diperoleh di situs web Perseroan (https://champion.co.id/) serta Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen kepada Perseroan melalui email corporate@champion.co.id.

Asli surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2026, di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240.

Pemegang Saham juga dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal RUPSLB, yaitu pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2026, pukul 16.00 WIB.

Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hendak menghadiri RUPSLB wajib menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Saham Independen yang dapat diperoleh di situs web Perseroan.

Pengumuman mengenai RUPSLB, beserta ringkasan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 2 November 2026 pada situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan, serta melalui surat kabar berbahasa Indonesia yakni Link Bisnis.

Pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB akan diumumkan melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI, dan situs web Perseroan pada tanggal 17 November 2026.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.

B. Agenda untuk RUPSLB

Agenda untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. **Agenda Pertama**: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*, yang meliputi:
   a. persetujuan atas pembatalan pencatatan (*delisting*) saham Perseroan dari BEI;
   b. persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
   c. persetujuan atas pelaksanaan Pembelian Kembali Saham sebagai implementasi pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*; dan
   d. pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting,* termasuk pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.
2. **Agenda Kedua**: Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama tersebut di atas, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Pertama mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen. Sementara itu, Agenda Kedua TIDAK mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen.

C. Persyaratan-Persyaratan Menurut Peraturan Perundang-Undangan untuk RUPSLB

Berdasarkan (i) POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020 dan (ii) Anggaran Dasar, prosedur untuk menyetujui keputusan atas mata acara yang akan dipertimbangkan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK 45/2024 *juncto* POJK 15/2020. RUPSLB harus dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

2. Agenda Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan *juncto* POJK 15/2020 yang mensyaratkan kehadiran Para Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah dan keputusan sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam RUPSLB.

Persyaratan Kuorum

Dalam hal kuorum kehadiran yang dipersyaratkan dalam RUPSLB untuk pengambilan keputusan atas masing-masing mata acara RUPSLB tidak tercapai, maka Perseroan dapat melangsungkan RUPSLB kedua dan ketiga dengan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

(i) RUPSLB Kedua

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB pertama tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSLB kedua.

2. Agenda Kedua: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

RUPSLB kedua dapat diselenggarakan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham dengan kehadiran yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah.

Keputusan RUPSLB kedua diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB kedua.

(ii) RUPSLB Ketiga

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana *Go Private* dan *Delisting*

RUPSLB ketiga dapat diselenggarakan dengan ketentuan bahwa RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari Saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Keputusan RUPSLB ketiga adalah sah apabila disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP DAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA ("KETERBUKAAN INFORMASI")

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA TBK ("**PERSEROAN**") DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP TERMASUK RENCANA PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA ("**RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING***"). KETERBUKAAN INFORMASI INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MEMASTIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM PUBLIK TETAP TERLINDUNGI, RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING* DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 45/POJK.04/2024 TANGGAL 27 DESEMBER 2024 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK ("**POJK 45/2024**"), PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 29/POJK.04/2023 TANGGAL 29 DESEMBER 2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("**POJK 29/2023**") SERTA PERATURAN NO. I-N TENTANG PEMBATALAN PENCATATAN (*DELISTING*) DAN PENCATATAN KEMBALI (*RELISTING*) PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BURSA EFEK INDONESIA NO. KEP-0054/BEI/05-2024 TANGGAL 6 MEI 2024 ("**PERATURAN BEI NO. I-N**").

PT Champion Pacific Indonesia Tbk

PT Champion Pacific Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha
Aktivitas Konsultasi Manajemen dan Bisnis Lainnya

Berkedudukan di Bekasi, Indonesia

Alamat
Jl. Raya Sultan Agung Km.28.5, Kp. Rawa Pasung,
Kota Baru, Kota Bekasi, 17133
Telepon: (62-21) 884 0040
Website: https://champion.co.id/ ; Email: corporate@champion.co.id

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:

(i) MELAKUKAN PEMBATALAN PENCATATAN (DELISTING) SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA;

(ii) MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP;

(iii) MELAKUKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM SEBAGAI IMPLEMENTASI PELAKSANAAN RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*;

(iv) MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING* PERSEROAN.

Pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham telah diumumkan pada tanggal 2 November 2026 pada situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), dan Perseroan serta di surat kabar berbahasa Indonesia yakni Link Bisnis. RUPSLB direncanakan akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2026 pada pukul 10.00 WIB hingga selesai, yang akan dilaksanakan di Mitsui House Jakarta, Jl. Diponegoro No. 42, Menteng, Jakarta Pusat. Pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang saham akan diumumkan pada tanggal 17 November 2026 oleh Perseroan pada situs web BEI, KSEI, dan Perseroan. Dalam hal terdapat tambahan dan/atau perubahan atas Keterbukaan Informasi, Perseroan akan melakukan pengumuman paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSLB.

Perseroan juga akan menyelenggarakan RUPSLB secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**").

Perseroan juga akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik setelah memperoleh persetujuan dalam RUPSLB terhadap seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu sebanyak 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili sekitar 16,78% (enam belas koma tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang menjadi obyek Pembelian Kembali Saham dengan harga Pembelian Kembali Saham sebesar Rp1.050 (seribu lima puluh Rupiah) per saham.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk

EQUITY SEKURITAS INDONESIA

PT EQUITY SEKURITAS INDONESIA

Wisma Hayam Wuruk, Lantai 12, Jl. Hayam Wuruk , No. 8, Jakarta
Telepon: 021-80632800 | Faks: 021-3840041

Dalam hal terdapat keraguan mengenai aspek apa pun dari Keterbukaan Informasi ini atau mengenai tindakan yang harus Anda ambil, maka Anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek Anda atau wakil perusahaan efek terdaftar Anda, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan atau penasihat profesional lainnya.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI, DAN SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA, SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN TERKAIT LAINNYA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL 2 NOVEMBER 2026

DIREKSI PERSEROAN

I. DEFINISI

Dalam Keterbukaan Informasi ini, kecuali konteks kalimat mensyaratkan lain, ungkapan-ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi sebagaimana didefinisikan sesuai dengan UUP2SK, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dan orang yang bersangkutan.

c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dan pihak tersebut;

d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Akuntan Publik berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021, 2022, 2023 dan 2024 serta Purwanto Susanti dan Surja (Ernst & Young) selaku auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025.

Entitas Anak berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan.

Anggaran Dasar berarti Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi, yaitu sebagaimana dimuat dalam Akta No. 195 tanggal 30 Oktober 1975, dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/215/9 tanggal 27 Juni 1978, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 473 tanggal 1 Agustus 1978 Tambahan No. 61 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta No. 409 tanggal 29 Juni 2026, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047315.AH.01.02.TAHUN 2026, tanggal 6 Juli 2026, sehubungan dengan persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025.

BEI berarti PT Bursa Efek Indonesia.

Biro Administrasi Efek atau **BAE** berarti PT Adimitra Jasa Korpora, yang merupakan biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengelola efek Perseroan.

Daftar Pemegang Saham berarti daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh Biro Administrasi Efek.

Delisting berarti penghapusan efek dari daftar efek yang tercatat di BEI sesuai Peraturan BEI No. I-N.

Dewan Komisaris berarti Dewan Komisaris Perseroan.

Direksi berarti Direksi Perseroan.

FPKS berarti Formulir Pembelian Kembali Saham.

Harga Pembelian Kembali Saham berarti harga yang ditawarkan oleh Perseroan yakni sebesar Rp 1.050 (seribu lima puluh Rupiah) sebagaimana didefinisikan dalam Bab V Informasi Mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Publik Bagian C pada Keterbukaan Informasi ini.

Hari Kerja berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional, cuti bersama, dan hari non-bursa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur dan dimana bank-bank beroperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jangka Waktu Pembelian Kembali Saham berarti jangka waktu keseluruhan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, yaitu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Keterbukaan Informasi ini pertama kali diumumkan, yakni sampai dengan tanggal 2 November 2027.

Keterbukaan Informasi berarti Keterbukaan Informasi ini yang ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan, diterbitkan pada 2 November 2026.

KSEI berarti Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Menkum berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

OJK berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Para Pemegang Saham atau **Pemegang Saham** berarti para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Pemegang Saham Independen berarti pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK) dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali (sebagaimana didefinisikan dalam POJK 15/2020 dan POJK 45/2024).

Pemegang Saham Publik berarti pemegang saham Perseroan yang sahamnya menjadi objek Pembelian Kembali Saham sehubungan dengan rencana perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, sebagaimana dimaksud dalam POJK 45/2024.

Pembelian Kembali Saham berarti penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian dari Pemegang Saham Publik yang akan dilakukan oleh Perseroan dalam rangka perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Penawaran tersebut akan dilakukan sesuai dengan POJK 45/2024 dan POJK 29/2023.

Pemohon atau Para Pemohon berarti Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Pembelian Kembali Saham ini sebelum Tanggal Pembayaran paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2027 pukul 16:00 WIB.

Pengendali berarti Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau

b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Peraturan BEI No. I-N berarti Peraturan No. I-N tentang Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) pada Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-0054/BEI/05-2024 tanggal 6 Mei 2024.

Periode Pembelian Kembali Saham berarti setiap periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPSLB sebagaimana diuraikan pada Bab V. Informasi Mengenai Rencana Pembelian Kembali Saham Publik Bagian D pada Keterbukaan Informasi ini.

Pernyataan Pendaftaran berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka penawaran umum atau perusahaan terbuka sesuai Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Perseroan berarti **PT Champion Pacific Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang sahamnya tercatat pada BEI, didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, serta berkedudukan di Bekasi, Indonesia.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk berarti PT Equity Sekuritas Indonesia, perusahaan efek yang merupakan anggota bursa BEI dan terdaftar sebagai anggota Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan KSEI, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, termasuk menerima dan memverifikasi pengajuan partisipasi serta melaksanakan pembayaran Harga Pembelian Kembali Saham kepada Pemegang Saham Publik melalui KSEI.

PMK 81/2024 berarti Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026, tanggal 22 Januari 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

POJK 14/2025 berarti Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025, tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

POJK 15/2020 berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020, tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK 29/2023 berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2023 , tanggal 29 Desember 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

POJK 45/2024 berarti Peraturan OJK No.45/POJK.04/2024, tanggal 27 Desember 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik.

Rencana *Go Private* dan *Delisting* berarti rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup termasuk rencana *Delisting*.

RUPSLB berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 09 Desember 2026 sehubungan dengan Rencana *Go Private dan Delisting* dan perubahan Anggaran Dasar serta, jika diperlukan, setiap RUPSLB selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan).

Rp berarti mata uang negara Republik Indonesia yang sah saat ini.

Saham berarti saham-saham Perseroan yang saat ini tercatat di BEI per tanggal Keterbukaan Informasi ini.

Saham Publik berarti seluruh saham Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik, yaitu sebanyak 155.658.180 (seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh) saham atau mewakili sekitar 16,78% (enam belas koma tujuh delapan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang menjadi obyek Pembelian Kembali Saham.

Suspensi Perdagangan berarti suspensi perdagangan Saham Perseroan di BEI yang telah diumumkan oleh BEI berdasarkan surat No.: PENG-SPT-00020/BEI.PP2/10-2026 pada tanggal 16 Oktober 2026.

Tanggal Pemanggilan RUPSLB berarti tanggal 17 November 2026, yaitu tanggal dilakukannya pemanggilan secara resmi oleh Perseroan kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB, yang memuat informasi mengenai waktu, tempat, mata acara rapat, serta tata cara kehadiran dan pemberian suara dalam RUPSLB sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tanggal Pembayaran berarti tanggal dilakukannya pembayaran Harga Pembelian Kembali Saham kepada Pemohon yang permohonannya telah diverifikasi dan disetujui, melalui Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan KSEI, untuk setiap Periode Pembelian Kembali Saham, yaitu tanggal 15 Februari 2027 untuk Periode I, 14 Mei 2027 untuk Periode II, 16 Agustus 2027 untuk Periode III, dan 02 November 2027 untuk Periode IV, sebagaimana diuraikan pada Bab V Bagian D Keterbukaan Informasi ini.

Tanggal Pencatatan berarti tanggal 16 November 2026, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB.

UUPM berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

UUPT berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023, tanggal 31 Maret 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

UUP2SK berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

WIB berarti Waktu Indonesia Barat.

II. PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi ini disampaikan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi kepada Para Pemegang Saham terkait:

- Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, termasuk pembatalan pencatatan saham Perseroan dari BEI;
- Tinjauan umum mengenai ketentuan dan persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*;
- Rencana pembelian kembali saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*; dan
- Informasi mengenai penyelenggaraan RUPSLB, termasuk tata cara kehadiran dan pemberian suara sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*.

B. Latar Belakang Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Sehubungan dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, Perseroan telah menyampaikan surat No. 075/CPI/DIR/X/2026 tanggal 15 Oktober 2026 mengenai Permohonan Pembatalan Pencatatan (*Delisting*) dan Permohonan Suspensi Efek Perseroan kepada BEI dan OJK, yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan *Go Private* dan *Delisting*.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2026, BEI melalui Pengumuman No. PENG-SPT-00020/BEI.PP2/10-2026 telah memutuskan untuk melakukan penghentian sementara perdagangan efek Perseroan di BEI pada seluruh pasar, yang berlaku efektif sejak Sesi Pra-Pembukaan Perdagangan Efek tanggal 16 Oktober 2026 hingga pengumuman BEI lebih lanjut.

Perseroan juga telah menyampaikan keterbukaan informasi awal kepada publik sehubungan dengan penghentian sementara perdagangan efek dan Rencana *Go Private* dan *Delisting* pada tanggal 16 Oktober 2026 melalui situs web BEI dan Perseroan.

Sebagai tindak lanjut atas hal-hal tersebut di atas, Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, dengan memperhatikan dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024, POJK 29/2023, dan Peraturan BEI No. I-N.

III. INFORMASI MENGENAI RENCANA *GO PRIVATE* DAN *DELISTING*

A. Alasan dan Tujuan Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan Rencana *Go Private* dan *Delisting* dengan alasan-alasan dan tujuan sebagai berikut:

a. Perseroan merupakan entitas induk (*holding company*) yang memiliki kegiatan usaha melalui entitas anak di berbagai sektor, yakni industri wadah untuk keperluan farmasi, makanan, dan kosmetik, perdagangan umum, jasa pengangkutan, percetakan, serta kegiatan usaha terkait lainnya. Dalam rangka mendukung pengembangan usaha jangka panjang, Perseroan berencana melakukan penataan dan optimalisasi strategi bisnis guna meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing usaha;

b. Perseroan bermaksud untuk memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk dalam upaya untuk melakukan efisiensi dengan peningkatan produktivitas dan kinerja operasional serta pengembangan bisnis;

c. Perseroan tidak memiliki rencana untuk mengakses kebutuhan pendanaan melalui pasar modal, baik dalam waktu dekat maupun di masa mendatang, sehingga Perseroan memandang bahwa status sebagai perusahaan terbuka tidak lagi diperlukan untuk mendukung kebutuhan pendanaan dan strategi pengembangan usaha Perseroan; dan

d. Saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di BEI dengan frekuensi dan volume perdagangan saham yang terbatas dalam periode tertentu, serta minimnya aktivitas transaksi di pasar yang menyebabkan kurang optimalnya fungsi pasar saham sebagai sarana likuiditas bagi Pemegang Saham Publik.

Sejalan dengan huruf (d) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan Saham Perseroan, tidak mudah bagi Pemegang Saham Publik untuk melakukan transaksi atas Saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, Pemegang Saham Publik memiliki kesempatan untuk menjual kepemilikan Saham Publik melalui pelaksanaan Pembelian Kembali Saham oleh Perseroan dengan Harga Pembelian Kembali Saham sebagaimana disampaikan pada Bab V bagian C di bawah ini.

B. Tinjauan Umum dan Persyaratan Pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*

Rencana *Go Private* dan *Delisting* merupakan rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup, yang mencakup pembatalan pencatatan Saham Perseroan dari BEI serta perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status tersebut.

Pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan POJK 45/2024, POJK 29/2023, dan Peraturan BEI No. I-N.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting* mencakup tahapan dan persyaratan utama sebagai berikut:

1. Persetujuan Pemegang Saham Independen

   Rencana *Go Private* dan *Delisting* harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen dalam RUPSLB sesuai dengan ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Publik

   Dalam rangka pelaksanaan Rencana *Go Private* dan *Delisting*, Perseroan akan melakukan pembelian kembali Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik setelah memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen pada RUPSLB.

   Informasi lebih lanjut mengenai rencana Pembelian Kembali Saham, termasuk harga, periode, mekanisme pelaksanaan, serta sumber pendanaan, diuraikan dalam Bab V Keterbukaan Informasi ini.

3. Pemenuhan Persyaratan Perubahan Status Perseroan

   Perseroan wajib memenuhi persyaratan lainnya dalam rangka rencana perubahan status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024.

4. Pembatalan Pencatatan Saham dari BEI dan Perubahan Anggaran Dasar

   Perseroan akan melaksanakan proses pembatalan pencatatan Saham dari BEI dan perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup, setelah memperoleh persetujuan dan memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku oleh OJK dan BEI.

C. Manfaat-Manfaat Rencana *Go Private* dan *Delisting* kepada Pemegang Saham Publik

Rencana *Go Private* dan *Delisting* diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Pemegang Saham Publik untuk menjual Saham Publik yang dimilikinya melalui mekanisme pembelian kembali Saham Publik oleh Perseroan.

1. **Harga Pembelian Kembali Saham yang Menarik**

   Dalam hal Rencana *Go Private* dan *Delisting* disetujui oleh RUPSLB, Perseroan berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham dengan harga pembelian kembali saham yang menarik dan lebih tinggi dibandingkan harga minimum penawaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penetapan harga sebagaimana diatur dalam POJK 45/2024 dan POJK 29/2023.

   Informasi lebih lanjut mengenai rencana Pembelian Kembali Saham, termasuk harga, periode, mekanisme pelaksanaan, serta sumber pendanaan, diuraikan dalam Bab V Keterbukaan Informasi ini.

2. **Pembayaran Biaya Transaksi/Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (*broker*/pialang) oleh Perseroan**

   Perseroan akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan transaksi pelaksanaan Pembelian Kembali Saham, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham Publik sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

3. **Konsekuensi dari Segi Pajak**

   Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*) pada saat Pembelian Kembali Saham hanya akan dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham, atau 0,6% (nol koma enam persen) dalam hal Saham yang dijual tersebut adalah Saham pendiri, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan PMK 81/2024.

   Dalam hal pencatatan Saham dihapuskan dari BEI, maka Pemegang Saham Publik yang tidak ikut serta dalam Pembelian Kembali Saham akan menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan yang tidak tercatat di BEI. Dengan demikian, Pemegang Saham Publik tersebut tidak akan dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI. Apabila Pemegang Saham hendak menjual Sahamnya setelah Saham Perseroan tidak lagi tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka dapat dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, keuntungan dari penjualan Saham akan dikenakan dengan tarif PPh badan sebesar 22% (dua puluh dua persen) . Sementara itu, bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, keuntungan dari penjualan Saham akan dikenakan tarif PPh progresif sebesar 5% (lima persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen). Apabila Pemegang Saham merupakan Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 238 PMK 81/2024, maka penjualan Saham Perseroan yang tidak lagi tercatat di BEI akan dikenakan PPh Pasal 26 yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari perkiraan hasil neto. Perkiraan penghasilan neto tersebut ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga tarif efektif PPh yang dikenakan adalah sebesar 5% (lima persen) dari harga jual Saham, kecuali mendapat pengecualian berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang berlaku.

SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

D. Konsekuensi Rencana *Go Private* dan *Delisting* bagi Pemegang Saham Publik

Apabila Rencana *Go Private* dan *Delisting* telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan dan seluruh persyaratan yang berlaku telah dipenuhi, Perseroan akan berubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup serta saham Perseroan tidak lagi tercatat dan diperdagangkan di BEI.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemegang Saham Publik yang tidak berpartisipasi dalam Pembelian Kembali Saham dan tetap memiliki saham Perseroan setelah selesainya proses *Go Private* dan *Delisting* akan tetap menjadi pemegang saham Perseroan yang berstatus perusahaan tertutup.

Dengan demikian, Pemegang Saham Publik tersebut perlu memperhatikan konsekuensi sebagai berikut:

a. Saham Perseroan tidak lagi dapat diperdagangkan melalui BEI, sehingga kesempatan untuk menjual saham melalui mekanisme perdagangan di BEI tidak lagi tersedia;

b. Likuiditas saham Perseroan berpotensi menjadi lebih terbatas karena pengalihan saham setelah *Delisting* harus dilakukan melalui mekanisme di luar BEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. Pengalihan saham setelah Perseroan berstatus sebagai perusahaan tertutup dapat memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda dibandingkan dengan transaksi saham melalui BEI, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Oleh karena itu, Pemegang Saham Publik diharapkan untuk mempertimbangkan secara saksama manfaat dan konsekuensi Rencana *Go Private* dan *Delisting* sebelum mengambil keputusan sehubungan dengan kepemilikan Sahamnya dalam Perseroan.

IV. INFORMASI MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Igar Jaya berdasarkan Akta Notaris No. 195 tanggal 30 Oktober 1975 dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/215/9 tanggal 27 Juni 1978, serta diumumkan dalam Lembaran Berita